

NEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUPREMATIF

Edisi Februari | Tahun 2025 No. 55

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kreatif | Atraktif | Suprematif



*Wujudkan Asta Cita
Ketahanan Pangan*

**Hentikan
Ketergantungan
Impor Daging**

H. Johan Rosihan, S.T





Mengokohkan Nasionalisme Relijius

Kita yakin Indonesia ini adalah warisan para ulama, habaib, dan santri pejuang yang benar-benar dihadirkan dengan menimbang kemaslahatan umum. Kalau kita kaji secara normatif yuridis isi kandungan Pancasila dan UUD 1945 kita akan temukan betapa para pendiri bangsa ini yang nota bene sebagian besarnya adalah ulama dan wakil-wakil umat-begitu tepat merumuskan dan benar-benar memahami, tujuan-tujuan (maqodid syariah) dalam pendirian negara bangsa yang merdeka.

Alam pikiran mereka nyaris sempurna memberikan arah Indonesia sebagai negara merdeka yang hadirnya harus membawa maslahat bagi rakyatnya sejalan dengan tujuan dihidirkannya syariat agama (maqodid syariah). Bahkan, kesan bangsa ini sebagai bangsa beragama dan relijius sangat kuat terasa saat membaca dan memahami dasar dan konstitusi negara. Ada banyak fakta (norma) yuridis yang mendukung pernyataan itu.

Kelima sila Pancasila tidak ada keraguan merupakan mani-

festasi dari maqodid syariah baik dalam cakupan klasik Imam Al-Ghozali dan terlebih dalam cakupan kontemporer. Sila-sila itu, yang dikatakan oleh sejarahwan sebagai puncak-puncak (kulminasi) kebudayaan nasional, faktanya begitu kuat pesan dan kesan penjagaannya terhadap apa-apa yang dipentingkan oleh syariat dalam hidup ini.

Pertama, penjagaan terhadap agama. Sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bentuk penjagaan terhadap keyakinan agama sebagai salah satu hak yang

tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun (non derogable right). Hal ini diperkuat dalam Pasal 29 UUD 1945. Melalui sila ini kita paham betapa dasar dan konstitusi kita begitu memuliakan peran agama dalam pembangunan seolah ingin mengatakan bahwa fitrahnya manusia itu beragama.

Kedua, penjagaan terhadap hidup dan kehidupan jelas dan terang sekali kita temukan sejak pembukaan (mukaddimah) UUD, Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah

darah Indonesia. Hal ini kemudian ditegaskan pada Pasal 28A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Ketiga, penjagaan terhadap akal. Pembukaan UUD 1945 menegaskan salah satu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang secara pondasional dan komprehensif dijelaskan dalam Bab Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Pasal 31. Ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat

Mengokohkan Nasionalisme Relijius

pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Keempat, penjagaan terhadap keturunan juga diatur secara spesifik merujuk Pasal 27 B. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Anak-anak keturunan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kelima, penjagaan terhadap hak asasi manusia. Penjagaan terhadap hak-hak asasi juga sangat maju di konstitusi kita. Bukan saja maju dalam arti area cakupannya yang luas, tapi juga maju dalam pengertian penjagaan atau proteksinya dari (hak-hak) kebebasan yang merusak martabat dan kemanusiaan.

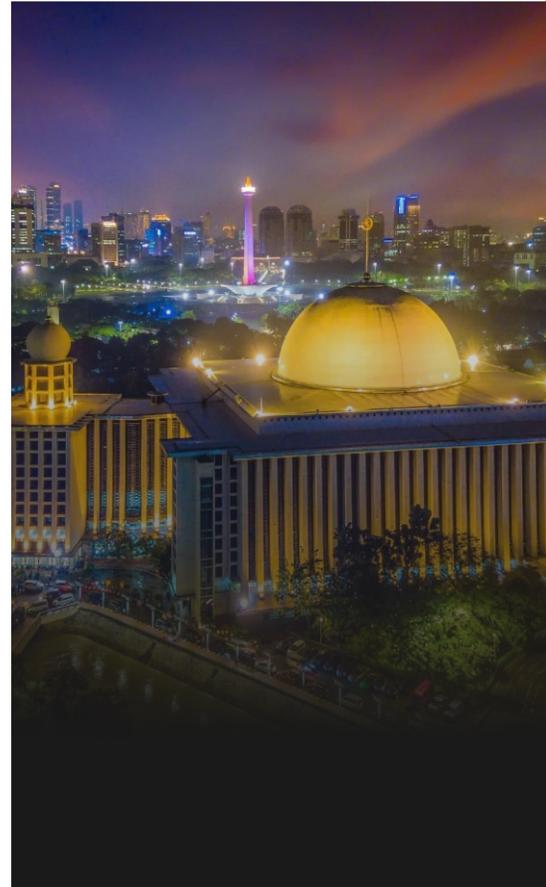
Hak-hak kita sebagai warga negara dijamin oleh konstitusi tapi pada saat yang sama kita harus bertanggung jawab dalam melaksanakannya.

Sampai di sini kita semestinya tidak lagi sanksi bahwa Pancasila dan UUD 1945 sebagian besar, jika tidak seluruhnya, telah memenuhi dan/atau memperkuat tujuan-tujuan syariat Islam (al maqosid syariah). Pancasila adalah dasar negara yang islami, UUD 1945 adalah konstitusi yang islami. Meski bukan dasar negara Islam dan bukan konstitusi negara Islam, karena sejak awal konsensus kita bernegara tidaklah membentuk negara atas dasar agama tertentu.

Konstitusi tidak menghendaki hak-hak kebebasan yang kebablasan (bebas tanpa nilai). Sebaliknya harus memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sampai di sini kita semestinya tidak lagi sanksi bahwa Pancasila dan UUD 1945 sebagian besar, jika tidak seluruhnya, telah memenuhi dan/atau memperkuat tujuan-tujuan syariat Islam (al maqosid syariah). Pancasila adalah dasar negara yang islami, UUD 1945 adalah konstitusi yang islami. Meski bukan dasar negara Islam dan bukan konstitusi negara Islam, karena sejak awal konsensus kita bernegara tidaklah membentuk negara atas dasar agama tertentu.

Indonesia memang bukan negara agama (dalam arti ada satu agama sebagai agama negara). Tapi, Indonesia jelas bukan negara sekuler liberal (dalam arti memisahkan atau bahkan menjauhkan urusan agama dari wilayah publik). Indonesia adalah negara yang menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Indonesia adalah negara beragama. Dan bagi kita umat Islam, Indonesia adalah negara yang islami, negara yang akan lahir sebagai baladun thoyyibatun wa rabbun ghafur. Inilah nasionalisme kita: nasionalisme religius.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Kreatif Atraktif Substantif



Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.
Ketua Fraksi PKS DPR RI



SOSIAL MEDIA
Fraksi PKS DPR RI



Hj. Ledia Hanifa A., S.Si., M.Psi.T.
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



Fraksi PKS Dukung Penuh Semua Aliansi Global untuk Hentikan Penjajahan Israel atas Palestina

Jakarta (07/02) -- Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengapresiasi terbentuknya sebuah aliansi sembilan negara untuk mengawasi pelanggaran internasional yang dilakukan Israel di Palestina.

Aliansi ini dinamai The Hague Group atau Grup Den Haag yang telah terbentuk di Belanda. Negara yang termasuk ke dalam aliansi itu adalah Afrika Selatan, Malaysia, Namibia, Kolombia, Bolivia, Chili, Senegal, Honduras dan Belize.

Kelompok tersebut dibentuk karena mereka berduka atas hilangnya nyawa, mata pencaharian, komunitas serta warisan budaya karena tindakan genosida yang dilakukan Israel di Gaza serta sisa wilayah Palestina lainnya yang diduduki.

Jazuli Juwaini berharap Indonesia bisa bergabung dalam aliansi ini bersamaan dengan upaya global lainnya untuk menghentikan penjajahan Israel atas Palestina.

"Semua upaya dan aliansi global untuk mendukung penghentian penjajahan Israel atas Palestina harus kita dukung. Kami mendorong Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam aliansi seperti ini selain upaya global lainnya," ungkapnya.

Anggota Komisi I DPR ini menilai lahirnya aliansi global

yang mengawasi dan mengefektifkan penegakan hukum internasional atas pelanggaran yang dilakukan Israel memiliki nilai strategis untuk dunia.

"Upaya ini akan semakin menekan dan mengucilkan Israel dan pendukungnya dari komunitas internasional. Tinggal beberapa negara saja yang setia mendukung Israel. Sebaliknya mayoritas negara

dunia sudah berbalik mendukung Palestina dan perdamaian dan jumlahnya semakin bertambah," terang Jazuli.

Anggota DPR Dapil Banten ini berharap dukungan kepada kemerdekaan Palestina melalui gencatan senjata permanen dan penghentian penjajahan yang dilakukan Israel harus terus dikuatkan melalui berbagai saluran diplomasi dan gerakan global.

"Saatnya dunia bersikap lebih keras dan lebih tegas dalam menghadapi keangkuhan Israel yang sama sekali tidak mau tunduk pada kesepakatan, aturan, dan hukum internasional," pungkas Jazuli.

lahirnya aliansi global yang mengawasi dan mengefektifkan penegakan hukum internasional atas pelanggaran yang dilakukan Israel memiliki nilai strategis untuk dunia. Upaya ini akan semakin menekan dan mengucilkan Israel dan pendukungnya dari komunitas internasional. Tinggal beberapa negara saja yang setia mendukung Israel.

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Anggota Komisi I DPR RI



Komisi I FPKS Ahmad Heryawan Dukung Regulasi dan Kebijakan Pembatasan Akses Medsos bagi Anak-Anak

Jakarta (08/02) --- Wakil ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mendukung Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) RI terkait rencana aturan baru mengenai akses media sosial (medsos) untuk anak-anak.

Beberapa negara, imbuh pria yang kerap disapa Aher ini, telah membuat regulasi terkait pembatasan anak-anak dalam menggunakan akses Media seperti di Jerman dan Australia, sudah ada regulasi yang mewajibkan platform digital harus menyediakan pengaturan keamanan khusus anak-anak.

Anak di bawah usia 16 tahun dilarang dan perlu izin orang tua sebelum dapat mengakses layanan tertentu di dunia maya.

"Pemerintah Indonesia melalui KemKomdigi RI perlu membuat regulasi atau aturan terkait penggunaan akses media bagi anak-anak, seperti di Jerman, Australia dan lainnya sudah ada regulasi membatasi

akses media bagi anak-anak dibawah 16 tahun," tegas Kang Aher dalam wawancara dengan awak media.

Lebih lanjut, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Periode 2024-2029 Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini menjelaskan bahwa Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan akses terhadap berbagai jenis media bagi anak-anak, baik dalam bentuk televisi, internet, maupun media sosial.

Namun, akses yang tidak terkontrol dapat membawa dampak negatif seperti paparan konten yang tidak sesuai usia, gangguan kesehatan mental, serta pengaruh terhadap perilaku sosial.

"Jelas bahwa teknologi digital telah memberikan kemudahan akses terhadap berbagai jenis media bagi anak-anak, baik dalam bentuk televisi, internet, maupun media sosial. Akan tetapi akses yang tidak terkontrol dapat membawa dampak negatif bagi anak-anak," ungkap Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS ini.

Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menyambut baik langkah dan rencana Kemkomdigi RI membuat regulasi dan kebijakan pembatasan akses media bagi anak-anak dalam rangka untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif media digital. Dengan pendekatan berbasis regulasi, edukasi, dan teknologi, anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih sehat dan aman.

"Regulasi atau Kebijakan pembatasan penggunaan akses media bagi anak-anak merupakan langkah penting dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif teknologi digital," demikian tutup kang Aher mengakhiri wawancaranya.



"Jelas bahwa teknologi digital telah memberikan kemudahan akses terhadap berbagai jenis media bagi anak-anak, baik dalam bentuk televisi, internet, maupun media sosial. Akan tetapi akses yang tidak terkontrol dapat membawa dampak negatif bagi anak-anak,"

**Dr. H. AHMAD
HERYAWAN, Lc., M.Si.**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI



image istimewa

Kawal Kedaulatan Laut Indonesia, Habib Idrus Dorong Penguatan Sistem Keamanan Maritim di Ambon

Ambon (06/02) — Dalam upaya memperkuat sistem keamanan laut nasional, Anggota Panitia Kerja Keamanan Laut (Panja Kamla) Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Idrus Al Jufri, melakukan kunjungan kerja ke Ambon, Rabu, (05/02/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda evaluasi dan perumusan kebijakan strategis guna menghadapi ancaman keamanan maritim yang semakin kompleks.

Menurut pria yang akrab disapa Habib Idrus, sebagai anggota kepulauan terbesar di du-

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menguasai 5,8 juta km² wilayah laut dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tetapi juga menghadapi tantangan serius seperti illegal fishing, penyelundupan, pelanggaran batas wilayah, hingga ancaman kejahatan siber maritim," ungkap Habib Idrus.

nia, Indonesia menguasai 5,8 juta km² wilayah laut dengan garis pantai sepanjang 95.181 km.

"Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tetapi juga menghadapi tantangan serius seperti illegal fishing, penyelundupan, pelanggaran batas wilayah, hingga ancaman kejahatan siber maritim," ungkap Habib Idrus.

Urgensi Penguatan Keamanan Laut Indonesia

Dalam diskusi bersama pemangu kepentingan di Ambon, Habib Idrus menyoroti beberapa tantangan utama dalam keamanan maritim nasional.

"Pertama, Maraknya Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Data tahun 2023 menunjukkan 269 kapal

pelaku illegal fishing berhasil diamankan, tetapi mayoritas masih berasal dari kapal nelayan Indonesia. Peringkat Indonesia dalam penanganan illegal fishing menurun drastis, dari peringkat 15 (2019) menjadi peringkat 6 terburuk di dunia (2024). Laut Natuna Utara dan perairan Maluku menjadi area rawan dengan dominasi kapal asing dari Vietnam, China, dan Filipina," jelas Habib Idrus.

Kedua, imbuhnya, Pelanggaran Wilayah oleh Kapal Asing. Kapal China Coast Guard (CCG) semakin sering masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara.

Vietnam kerap mengawal nelayan mereka yang melakukan illegal fishing di wilayah

Kawal Kedaulatan Laut Indonesia, Habib Idrus Dorong Penguatan Sistem Keamanan Maritim di Ambon

« SEBELUMNYA

perairan Indonesia.

Indonesia perlu memperkuat kehadiran TNI AL dan Bakamla di wilayah perbatasan maritim.

Penyelundupan Barang Ilegal dan Kejahatan Maritim 80% peredaran narkoba di Indonesia masuk melalui jalur laut, terutama dari Myanmar ke Sumatra dan Kalimantan.

"Ketiga, Peningkatan penyelundupan senjata ke Papua melalui jalur laut. Selat Malaka dan Laut Sulawesi menjadi jalur utama penyelundupan barang ilegal," ujar Anggota DPR RI dari Dapil Banten III ini.

Keempat, kata Habib Idrus, Ancaman Non-Tradisional: Kejahatan Siber, Perubahan

Iklim, dan Pencemaran Laut Serangan siber terhadap sistem navigasi kapal dan pelabuhan utama meningkat tajam.

"Pencemaran laut akibat tumpahan minyak dan limbah industri mengancam ekosistem maritim Indonesia. Perubahan iklim meningkatkan permukaan air laut dan memperburuk bencana alam di wilayah pesisir," tandasnya.

Tumpang Tindih Kewenangan dan Lemahnya Koordinasi Antar instansi

Banyak instansi berwenang dalam keamanan laut, seperti TNI AL, Bakamla, Polri, KKP, Bea Cukai, dan Kemenuh, tetapi koordinasi masih belum efektif.

Tidak adanya pusat komando terpadu menyebabkan

keamanan laut bukan hanya persoalan pertahanan nasional, tetapi juga berdampak langsung pada ekonomi, stabilitas sosial, dan ekologi. Jika kita gagal mengamankan perairan kita, maka bukan hanya kedaulatan yang terancam, tetapi juga keberlanjutan sumber daya laut dan ekonomi perikanan kita

patroli tumpang tindih, pemborosan anggaran, dan respons terhadap ancaman menjadi lambat.

"Indonesia Harus Punya Sistem Keamanan Maritim yang Solid dan Proaktif," tegas Habib Idrus.

Dalam kunjungannya, Habib Idrus Al Jufri menegaskan bahwa Indonesia perlu memperkuat sistem keamanan maritim secara menyeluruh.

Ia menyampaikan beberapa rekomendasi strategis yang menjadi fokus utama dalam rapat Panja Kamla, yaitu Pertama, Membentuk Komando Keamanan Laut Terpadu

National Maritime Security Command diusulkan sebagai solusi untuk mengintegrasikan operasi keamanan laut yang saat ini masih terfragmentasi.

"Perlu adanya revisi regulasi agar Bakamla memiliki kewenangan lebih besar dalam koordinasi keamanan laut," pungkasnya.

Kedua, lanjut Habib Idrus, Modernisasi Teknologi Pengawasan Laut

Pengadaan radar maritim, drone, dan satelit pengawas untuk memperkuat pengawasan perairan.

"Ketiga, Modernisasi kapal patroli dan pesawat pengintai maritim guna meningkatkan efektivitas pengamanan.

Peningkatan Patroli dan Kerja Sama Internasional

Meningkatkan patroli bersama dengan Malaysia,



Image Istimewa

Filipina, dan Australia untuk mengatasi ancaman lintas batas," urai Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.

Keempat, imbuhnya, mendorong ASEAN membentuk Maritime Security Cooperation Center untuk menangani isu keamanan laut secara regional.

"Penegakan Hukum yang Lebih Keras terhadap IUU Fishing

Sanksi lebih berat terhadap kapal asing yang

melakukan illegal fishing, termasuk penitaan dan pelepasan kapal," ujarnya.

Kelima, kata Habib Idrus, Memberdayakan nelayan untuk melaporkan aktivitas kapal asing yang mencurigakan.

"Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Sistem Keamanan Maritim

Memberikan insentif bagi

BERIKUTNYA >>>

Kawal Kedaulatan Laut Indonesia, Habib Idrus Dorong Penguatan Sistem Keamanan Maritim di Ambon

« SEBELUMNYA

nelayan yang berperan dalam pengawasan laut.

Program edukasi bagi masyarakat pesisir terkait pelaporan aktivitas mencurigakan dan mitigasi ancaman maritim," ungkapnya.

Keamanan Laut : Pilar Utama Kedaulatan dan Stabilitas Ekonomi Nasional

Habib Idrus Al Jufri menegaskan bahwa keamanan laut bukan hanya persoalan

pertahanan nasional, tetapi juga berdampak langsung pada ekonomi, stabilitas sosial, dan ekologi.

"Jika kita gagal mengamankan perairan kita, maka bukan hanya kedaulatan yang terancam, tetapi juga keberlanjutan sumber daya laut dan ekonomi perikanan kita," tegasnya.

Sebagai langkah konkret, kata Habib Idrus, hasil pertemuan di Ambon ini akan menjadi bahan kajian utama

bagi Panja Kamla Komisi I DPR RI dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih kuat.

"Panja Kamla juga akan mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran tambahan guna memperkuat sistem keamanan maritim Indonesia," pungkasnya.

Langkah Selanjutnya Sinergi dan Implementasi Kebijakan yang Efektif

"Kunjungan kerja ini menjadi tonggak penting dalam perumusan kebijakan keamanan laut yang lebih komprehensif," tandasnya.

DPR RI, kata Habib Idrus, berkomitmen untuk, pertama, merevisi regulasi keamanan laut guna memperkuat koordinasi antar instansi.

"Kedua, Mengalokasikan anggaran tambahan untuk modernisasi teknologi pengawasan maritim," ujarnya.

Ketiga, lanjut Habib Idrus, Memperkuat kerja sama diplomasi maritim di tingkat ASEAN dan global.

"Keempat, memberdayakan masyarakat pesisir sebagai bagian dari sistem keamanan maritim Indonesia. Dengan sinergi antara pemerintah, TNI, Bakamla, akademisi, dan masyarakat, diharapkan sistem keamanan laut Indonesia dapat menjadi lebih kuat, proaktif, dan responsif terhadap ancaman global dan regional," tutup Habib Idrus.



memberdayakan masyarakat pesisir sebagai bagian dari sistem keamanan maritim Indonesia. Dengan sinergi antara pemerintah, TNI, Bakamla, akademisi, dan masyarakat, diharapkan sistem keamanan laut Indonesia dapat menjadi lebih kuat, proaktif, dan responsif terhadap ancaman global dan regional

**HABIB IDRUS SALIM
ALJUFRI, Lc., M.B.A.**

Anggota Komisi I DPR RI



image istimewa

Aleg PKS Ateng Sutisna Dukung Kemendagri Usut Aparat Desa Terlibat Penerbitan SHGB dan SHM Pagar Laut

Jakarta (04/02) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendorong serta mendukung penuh langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengusut keterlibatan aparatur desa dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) terkait pemagaran laut.

Menurut Ateng, hal ini merupakan persoalan serius yang harus ditelusuri lebih dalam.

“Keterlibatan aparat desa dalam penerbitan SHGB dan SHM (Sertifikat Hak Milik) di kawasan pesisir ini adalah fenomena yang nyata. Saya meyakini bisa jadi bukan hanya kepala desa yang terlibat, melainkan bisa juga perangkat desa lainnya, atau bahkan pejabat di tingkat yang lebih tinggi,” ujar Ateng.

Ateng menegaskan bahwa Kemendagri sebagai pembina aparat desa harus mengambil langkah investigatif menyeluruh pada desa-desa pesisir yang memiliki kasus pagar laut

maupun kasus sertifikat di atas laut, bukan hanya di Kabupaten Tangerang, Banten.

Ateng menilai, praktik serupa sangat mungkin terjadi di daerah lain dan perlu ditindak secara menyeluruh.

“Kami mendorong Kemendagri untuk tidak hanya fokus di satu lokasi saja. Investigasi harus dilakukan secara luas di desa-desa pesisir lain yang mengalami hal serupa, termasuk di luar Tangerang. Jika ada temuan, harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ateng menyatakan dukungannya terhadap langkah pencopotan aparat desa yang terbukti terlibat dalam

penerbitan sertifikat tersebut.

Ia menilai langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam menertibkan pelaku penyalahgunaan kewenangan dalam urusan sertifikasi tanah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap instansi.

“Jika terbukti bersalah, pencopotan harus dilakukan tanpa kompromi. Kemendagri dapat mengikuti Kementerian ATR/BPN yang memecat beberapa pegawai yang terbukti terlibat (dalam kasus pagar laut). Aparatur desa yang menyalahgunakan wewenang tidak boleh dibiarkan tetap berada di posisinya karena itu bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah desa,” katanya.

Sebagai penutup, Ateng menekankan pentingnya penindakan hukum bagi aparat desa yang terbukti melanggar aturan.

Menurutnya, pencopotan saja tidak cukup untuk memberikan efek jera, tetapi harus ada proses hukum yang



“Keterlibatan aparat desa dalam penerbitan SHGB dan SHM (Sertifikat Hak Milik) di kawasan pesisir ini adalah fenomena yang nyata. Saya meyakini bisa jadi bukan hanya kepala desa yang terlibat, melainkan bisa juga perangkat desa lainnya, atau bahkan pejabat di tingkat yang lebih tinggi,

Ir. H. ATENG SUTISNA
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IX

jelas bagi mereka yang menyalahgunakan jabatannya.

“Pencopotan memang perlu, tapi tidak cukup. Jika ada unsur pidana, aparat desa yang

terlibat harus diproses hukum agar ada efek jera. Kita tidak boleh membiarkan hal seperti ini terus terjadi,” tutup Ateng.



image istimewa

Komisi III FPKS Surahman Hidayat Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Pesta Seks Gay Di Jaksel

Jakarta (06/02) --- Anggota Komisi III DPR RI FPKS Surahman Hidayat mengapresiasi kesigapan Polri dalam pengungkapan kasus pesta seks gay

yang terjadi di Habitate Apart Hotel Rasuna, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (01/02/2025), sekaligus meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

"Sebagai anggota Komisi III DPR RI saya mengapresiasi kepolisian, khususnya Ditreskrim Polda Metro Jaya yang bergerak cepat dalam pengungkapan kasus pesta seks gay ini, langkah ini merupakan keseriusan aparat dalam menjaga ketertiban masyarakat," tutur Surahman.

Menurut Surahman, kasus pesta gay ini harus menjadi perhatian seluruh pihak karena perilaku ini bertentangan dengan norma agama, Pancasila serta merupakan perilaku tidak sehat dan berbahaya.

"Perilaku gay ini harus menjadi perhatian semua pihak

karena sangat bertentangan dengan norma agama dan Pancasila serta perilaku ini juga sangat tidak sehat dan berbahaya sehingga perlu ada sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku. Kita harus menyadari terhadap resiko kesehatan yang ditimbulkan, dimana pesta seks sesama jenis berpotensi mempercepat Infeksi Menular Seksual (IMS) diantaranya HIV/AIDS yang masih menjadi ancaman serius di Indonesia," tegas Surahman.

"Kami mendukung kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut serta proses hukum harus berjalan dengan transparan, adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. langkah ini menjadi peringatan bersama agar kasus seperti ini tidak semakin marak di kemudian hari," pungkas Surahman.

"Kami mendukung kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut serta proses hukum harus berjalan dengan transparan, adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**Dr. KH. SURAHMAN
HIDAYAT, M.A.**

Anggota Komisi III DPR RI



image Istimewa

Raker Dengan KY Soal RUU KUHAP, Legislator PKS Adang : Ini Adalah Karya Agung

Jakarta (11/02) — Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Ketua Komisi Yudisial pada Senin, 10 Februari 2025.

Raker ini cukup penting karena mengagendakan masukan dari Ketua KY mengenai hal-hal krusial yang perlu diadopsi dalam RUU KUHAP.

“Saya mengapresiasi Komisi Yudisial yang telah melakukan langkah-langkah yang begitu baik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas, integritas dan martabat hakim”

Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Komisi III DPR RI

Komisi III berkomitmen untuk mengejar pembahasan RUU tersebut selesai di tahun ini mengingat KUHAP akan segera berlaku efektif pada Januari 2026.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Komjen Pol. (Purn) Adang Daradjatun menyatakan dengan mengungkap sejarah bahwa tahun 1981 ketika KUHAP lahir, dirinya menjabat Kapolsek.

“Ketika KUHAP ada pada saat itu, tahun 1981, yang merupakan karya agung, saya ingat betul sedang diamanahi Kapolsek dan saya berharap Komisi Yudisial bisa menjadi bagian dari karya agung KUHAP saat ini”, jelas Adang.

Pada kesempatan tersebut, Adang menekankan bahwa perkembangan teknologi yang pesat sangat mempengaruhi dunia hukum pidana.

“Kita harus sadar betul bahwa perkembangan teknologi

yang pesat akan sangat mempengaruhi dunia hukum pidana”, pungkas mantan Wakilpolri ini.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan salah satu isu RUU KUHAP yang dinilai sudah ketinggalan zaman dan perlu segera mengadopsi perkembangan elektronik dan digital, seperti persidangan online dan alat bukti digital/elektronik.

Sebagai penutup, pria kelahiran Bogor ini tidak lupa memberikan apresiasi kepada Komisi Yudisial atas dedikasi dan komitmennya dalam menjaga sistem peradilan pidana Indonesia.

“Saya mengapresiasi Komisi Yudisial yang telah melakukan langkah-langkah yang begitu baik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas, integritas dan martabat hakim”, tutupnya.



image istimewa

Aleg PKS Slamet Apresiasi Kebijakan Pemerintah dalam Penyerapan Gabah Petani Saat Panen Raya

Jakarta (07/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, drh. Slamet, mengapresiasi langkah pemerintah dalam meningkatkan harga pembelian gabah petani melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) No. 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bapanas No. 2/2025.

Kebijakan ini, kata Slamet, menetapkan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras yang bertujuan memperkuat cadangan beras nasional dan mendukung swasembada pangan.

Dalam keputusan tersebut, pemerintah menetapkan harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kg. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan HPP tahun 2024 yang hanya Rp6.000 per kg dengan kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%. Kenaikan harga ini diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih baik terhadap pendapatan petani serta mendorong stabilitas harga di tingkat produsen.

"Langkah pemerintah ini patut diapresiasi karena memberikan keuntungan lebih bagi petani, terutama di masa panen raya. Selain itu, terobosan kebijakan yang menghapus syarat kadar air dan kadar hampa dalam pembelian gabah merupakan langkah progresif

yang dapat meningkatkan daya serap Perum Bulog," ujar Slamet.

Selama ini, serapan Bulog terhadap gabah petani pada musim panen raya kerap menghadapi kendala karena persaingan dengan penggilingan swasta. Dengan adanya kebijakan baru ini, pemerintah menargetkan penyerapan gabah oleh Bulog pada panen raya Februari hingga April 2025 mencapai 3 juta ton. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan stok cadangan beras nasional sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar.

Namun, Slamet menekankan bahwa kebijakan ini harus diimbangi dengan upaya pendampingan kepada petani untuk memastikan kualitas panen tetap terjaga.

"Pendampingan dari penyuluh pertanian, kelompok tani, serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), sangat diperlukan agar kebijakan

Aleg PKS Slamet Apresiasi Kebijakan Pemerintah dalam Penyerapan Gabah Petani Saat Panen Raya

« SEBELUMNYA

penyerapan gabah ini berjalan optimal. Keterlibatan TNI dalam pengawasan penyerapan gabah merupakan langkah strategis untuk memastikan kebijakan ini benar-benar berdampak positif bagi petani,” tambahnya.

Selain itu, Slamet juga mendorong Perum Bulog untuk meningkatkan kesiapan infrastruktur guna mendukung optimalisasi serapan gabah.

“Bulog perlu memastikan kesiapan gudang penyimpanan, infrastruktur penggilingan, serta meningkatkan akses petani terhadap Bulog agar mereka dapat menjual gabahnya dengan lebih mudah dan menguntungkan,” jelasnya.

Dengan kebijakan yang

lebih fleksibel dalam penyerapan gabah serta dukungan infrastruktur yang memadai, diharapkan kesejahteraan petani semakin meningkat dan ketahanan pangan nasional semakin kuat.

Slamet menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap petani harus terus dijaga agar sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Harapan kita semua adalah petani dapat menikmati hasil kerja keras mereka dengan harga yang layak, sementara pemerintah dapat memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi bagi masyarakat. Kebijakan ini harus terus dikawal agar implementasinya berjalan dengan baik di lapangan,” pungkask Slamet.



“Langkah pemerintah ini patut diapresiasi karena memberikan keuntungan lebih bagi petani, terutama di masa panen raya. Selain itu, terobosan kebijakan yang menghapus syarat kadar air dan kadar hampa dalam pembelian gabah merupakan langkah progresif yang dapat meningkatkan daya serap Perum Bulog,”

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI



Wakil Ketua Komisi IV DPR FPKS Minta PT Pupuk Indonesia Jamin Ketersediaan Pupuk Bersubsidi

Jakarta (05/02) --- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, meminta PT Pupuk Indonesia untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi serta menyalurkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah ini imbuhnya, diharapkan dapat mendukung pencapaian swasembada pangan nasional serta memberikan kepastian bagi petani dalam memperoleh pupuk yang mereka butuhkan.

Dalam pernyataannya, Abdul Kharis menegaskan pentingnya tata kelola yang baik dalam distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh petani yang berhak.

"Kami mengharapkan PT Pupuk Indonesia menjalankan distribusi pupuk bersubsidi dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Ketersediaan pupuk yang mencukupi serta distribusi yang efektif akan sangat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian," ujar Abdul Kharis.

Ia juga menyoroti peran strategis PT Pupuk Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan memastikan kelancaran sistem distribusi, mencegah penyimpangan, serta

meningkatkan pengawasan agar pupuk bersubsidi tidak disalahgunakan.

"Kami berharap ada mekanisme kontrol yang lebih ketat agar pupuk bersubsidi tidak diselewengkan dan benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan. Sinergi antara pemerintah dan pihak terkait sangat penting dalam memastikan ketahanan pangan yang kuat," tambahnya.

Selain itu, Abdul Kharis menekankan perlunya transparansi dalam pendistribusian

pupuk, termasuk dalam sistem alokasi dan monitoring yang lebih akurat. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus dikawal dengan baik agar petani tidak mengalami kendala dalam memperoleh pupuk.

Sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, Abdul Kharis berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengawal kebijakan terkait distribusi pupuk bersubsidi guna mendukung pertumbuhan sektor pertanian yang berkelanjutan.

"Kami akan terus memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar berpihak kepada petani, karena sektor pertanian yang kuat merupakan pilar utama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional," tutupnya.

"Kami mengharapkan PT Pupuk Indonesia menjalankan distribusi pupuk bersubsidi dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Ketersediaan pupuk yang mencukupi serta distribusi yang efektif akan sangat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian,"

**Dr. H. ABDUL KHARIS
ALMASYHARI**

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI



image istimewa

Aleg PKS Riyono 'Caping': Bulog Siap Kerjasama dengan Poktan/Gapoktan dan BUMDes serap Gabah Petani

Jakarta (06/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Riyono 'Caping' mengusulkan untuk penyerapan gabah petani oleh Bulog bisa dilakukan oleh gapoktan dan bumdes diterima oleh Bulog.

Tugas penyerapan 3 juta ton beras yang diberikan oleh Presiden Prabowo merupakan kerja super keras yang harus dilakukan oleh Bulog. Pengalaman 2022 sampai 2024 Bulog tidak mampu serap gabah petani semaksimal mungkin.

Tugas penyerapan 3 juta ton beras yang diberikan oleh Presiden Prabowo merupakan kerja super keras yang harus dilakukan oleh Bulog. Pengalaman 2022 sampai 2024 Bulog tidak mampu serap gabah petani semaksimal mungkin. Bulog sebagai lembaga pelaksana kebijakan pangan dengan fungsi buffer stok harus mampu dan bisa serap 3 juta ton beras petani, tantangan berat sekali. 2024 hanya mampu serap 1.24 juta Ton beras”

RIYONO, S.Kel., M.Si.

Anggota Komisi IV DPR RI

“Bulog sebagai lembaga pelaksana kebijakan pangan dengan fungsi buffer stok harus mampu dan bisa serap 3 juta ton beras petani, tantangan berat sekali. 2024 hanya mampu serap 1.24 juta Ton beras” papar Riyono 'Caping' Anggota Komisi IV FPKS.

Paparan Bulog dalam RDP bersama komisi 4 Bulog menyampaikan bahwa mereka siap dan mampu menyerap beras 3 juta ton dengan anggaran 16 triliun lebih. Strategi Bulog dengan kerjasama dengan mitra dan tim jemput gabah beras serta pembentukan posko di kantor cabang Bulog se Indonesia.

“PKS mengusulkan agar bulog bisa kerjasama dengan petani dan Bumdes, dan diterima oleh Bulog untuk kerjasama tertulis dalam menyerap gabah petani dengan segala kualitasnya,” tambah Riyono.

Riyono akan menguji dan melihat langsung proses penyerapan gabah di dapil 7 Jatim meliputi Magetan Trenggalek Ngawi Ponorogo Pacitan.

“Saya akan pastikan di dapil petani mendapatkan harga sesuai dengan ketentuan kabadan Bapanas, untuk GKP 6500/kg, jangan sampai ada keluhan lagi harga gabah murah saat panen,” tutup Riyono Anak petani Magetan.



Anggota FPKS Saadiah Uluputty: Keputusan Bapanas Perkuat Ketahanan Pangan dan Lindungi Petani

Jakarta (05/02) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) No. 14 dan No. 16 Tahun 2025 yang menggantikan Keputusan No. 2/2025 terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atas gabah dan beras.

Keputusan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta melindungi pendapatan petani.

"Kami menyambut baik kebijakan ini karena memastikan Bulog membeli Gabah Kering Panen (GKP) dari petani dengan harga tetap Rp6.500 per kg, tanpa adanya rafaksi harga. Ini akan memberikan kepastian harga bagi petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka," ujar Saadiah Uluputty.

Keputusan baru ini menjadi instrumen penting dalam menerjemahkan instruksi presiden Prabowo untuk menyerap gabah petani berapapun jumlahnya dengan cara menghilangkan rafaksi harga bagi gabah yang sebelumnya lumrah dilakukan ketika membeli gabah dari petani.

"Dengan penghapusan rafaksi ini, petani diharapkan tidak lagi dirugikan akibat penurunan harga yang diberlakukan berdasarkan

kuualitas gabah di luar standar yang ditentukan. Hal ini diharapkan dapat mendorong petani untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil panennya," ungkapnya.

Anggota DPR RI dapil Maluku ini juga mengapresiasi komitmen Bapanas dan Bulog dalam menyerap gabah petani tanpa rafaksi harga serta pelibatan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan kelompok tani dalam upaya penyerapan gabah sebanyak 3 juta ton.

Menurutnya, meskipun angka tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total produksi gabah petani selama panen raya sebesar 29 juta ton namun angka tersebut telah menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat stabilitas pangan nasional dan mempercepat distribusi beras ke masyarakat.

Namun demikian, Saadiah Uluputty mengingatkan Bulog untuk mengantisipasi berbagai

Anggota FPKS Saadiah Uluputty: Keputusan Bapanas Perkuat Ketahanan Pangan dan Lindungi Petani

« SEBELUMNYA

tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini, khususnya terkait infrastruktur seperti ketersediaan gudang penyimpanan, jalur distribusi yang efisien, serta kemudahan akses bagi petani.

“Perlu ada perbaikan dan peningkatan infrastruktur guna memastikan penyerapan gabah berjalan optimal dan tidak

menimbulkan kerugian di lapangan,” tambahnya.

Selain itu, evaluasi harga dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi pasar dan memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga. Pemerintah harus memastikan bahwa keputusan ini tidak hanya bermanfaat



image istimewa

at bagi petani tetapi juga bagi konsumen dengan menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

Dalam jangka panjang, Fraksi PKS juga mendorong adanya kebijakan yang lebih komprehensif untuk mendukung sektor pertanian, termasuk dukungan terhadap sarana produksi seperti pupuk dan bibit unggul, serta akses perdagangan yang lebih mudah bagi petani.

“Dengan dukungan yang memadai, ketahanan pangan nasional dapat lebih kuat dan kesejahteraan petani semakin meningkat,” ujar Saadiah.

Saadiah menegaskan bahwa Fraksi PKS akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi petani dan masyarakat luas.

“Kami akan memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik di lapangan dan akan terus berjuang untuk kepentingan petani dan ketahanan pangan nasional,” tegasnya.

Keputusan ini, imbuhnya, diharapkan dapat menjadi tolok ukur penting dalam kebijakan pangan nasional, memastikan kesejahteraan petani, dan menjaga ketersediaan beras di dalam negeri.

“Sinergi antara pemerintah, Bulog, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini,” tutup Saadiah.



Selain itu, evaluasi harga dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi pasar dan memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga. Pemerintah harus memastikan bahwa keputusan ini tidak hanya bermanfaat bagi petani tetapi juga bagi konsumen dengan menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI



image istimewa

Wujudkan Asta Cita Ketahanan Pangan

Aleg PKS Johan: Bapanas dan Kementan Harus Hentikan Ketergantungan Impor Daging

Jakarta (11/02) -- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyoroti kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian (Kementan) yang kembali mengandalkan impor daging kerbau dan sapi untuk menjaga stok pangan menjelang Ramadan dan Lebaran.

Menurutnya, langkah ini bertentangan dengan semangat Asta Cita dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional, yang seharusnya bertumpu pada produksi dalam negeri.

"Ketahanan pangan yang sejati hanya bisa dicapai jika kita mandiri dalam produksi. Asta Cita Ketahanan Pangan menuntut keberpihakan pada petani dan peternak lokal, bukan terus bergantung pada impor sebagai solusi instan. Bapanas dan Kementan harus berkomitmen memperkuat peternakan nasional agar Indonesia tidak terus menjadi pasar bagi daging impor," tegas Johan dalam keterangannya di Jakarta.

Johan menegaskan bahwa impor daging yang terus berulang menunjukkan lemahnya strategi jangka panjang dalam membangun kemandirian pangan.

Johan meminta Bapanas sebagai pengendali kebijakan pangan nasional untuk mengambil langkah lebih serius dalam memastikan produksi

dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan nasional, tanpa terus mengandalkan impor.

"Jika kita benar-benar ingin mewujudkan Asta Cita Ketahanan Pangan, maka Kementan dan Bapanas harus fokus pada penguatan sektor peternakan, dari hulu hingga hilir. Peternak harus diberikan akses pakan murah, teknologi peternakan modern, serta jaminan harga jual yang menguntungkan. Jika ini tidak dilakukan, maka impor akan terus menjadi solusi jangka pendek tanpa ada penyelesaian struktural," ujarnya.

Johan juga menyoroti dampak negatif impor daging bagi peternak kecil, yang semakin kehilangan daya saing akibat harga daging impor yang lebih murah.

"Beberapa dampak yang terjadi di lapangan antara lain Pertama Harga daging lokal tertekan, membuat peternak sulit menjual hasil ternaknya dengan harga wajar," ungkap Johan.

Wujudkan Asta Cita Ketahanan Pangan, Aleg PKS Johan: Bapanas dan Kementan Harus Hentikan Ketergantungan Impor Daging

« SEBELUMNYA

Kedua imbuahnya. Minimnya dukungan infrastruktur peternakan, menyebabkan biaya produksi peternak lebih tinggi dibandingkan harga daging impor.

"Ketiga, peternak kecil semakin tersingkir dari pasar, karena industri lebih memilih daging impor yang lebih murah dan memiliki rantai distribusi lebih efisien," ujar Johan.

"Bapanas harus memasti-

kan bahwa kebijakan impor dilakukan dengan kuota ketat dan tidak merusak pasar domestik. Sementara itu, Kementan harus mempercepat langkah nyata dalam meningkatkan populasi dan produktivitas ternak lokal," tambah Johan.

Sebagai bagian dari Komisi IV, Johan Rosihan menawarkan beberapa langkah konkret agar Indonesia benar-benar bisa menghentikan ketergantungan impor dalam jangka menengah hingga

panjang.

"Pertama, bapanas harus menetapkan target pengurangan impor secara bertahap, dengan strategi peningkatan produksi lokal," tandasnya.

Kedua, lanjut Johan, Kementan harus menggenjot populasi sapi dan kerbau nasional, melalui program inseminasi buatan, insentif bagi peternak, dan penyediaan subsidi pakan.

"Ketiga, bulog harus meningkatkan kapasitas cold storage dan RPH modern, agar distribusi daging lokal lebih efisien dan kompetitif," sebut Johan.

Keempat, lanjut Johan, Pemerintah harus menetapkan proteksi harga daging lokal, agar peternak tidak dirugikan oleh daging impor yang lebih murah.

"Kelima, pengendalian kuota impor yang lebih ketat, serta memastikan impor hanya dilakukan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak," pungkasnya.

"Jika kita ingin mewujudkan Asta Cita dalam ketahanan pangan, maka Bapanas, Kementan, dan Bulog harus melakukan reformasi kebijakan yang nyata. Impor hanya boleh menjadi solusi darurat, bukan kebijakan permanen. Kedaulatan pangan tidak bisa dibangun dengan ketergantungan pada pasar luar, tetapi harus bertumpu pada penguatan produksi dalam negeri," tutup Johan.



"Ketahanan pangan yang sejati hanya bisa dicapai jika kita mandiri dalam produksi.

Asta Cita Ketahanan Pangan menuntut keberpihakan pada petani dan peternak lokal, bukan terus bergantung pada impor sebagai solusi instan. Bapanas dan Kementan harus berkomitmen memperkuat peternakan nasional agar Indonesia tidak terus menjadi pasar bagi daging impor,"

H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI



image istimewa

INFOGRAFIS

FRAKSI PKS DPR RI



Dukung Makan Bergizi Gratis, PKS Minta Pemerintah Siap atasi **Kendala dan **Tantangan****

PKS TV DPR RI | #PKSDPRRI | @fraksiPKSDPRRI | @fraksiPKSDPRRI | @fraksiPKSDPRRI

Anggaran Makan Bergizi Gratis Tahun 2025

TOTAL ANGGARAN **71 TRILIUN**

Pemenuhan Gizi Minimal Rp 63,4 Triliun

Dukungan Manajemen Operasional Pelaksanaan Rp 7,4 Triliun

Rencana Anggaran dan Target Penerimaan Makan Bergizi Gratis Tahun 2025-2029

Tahun	Rencana Anggaran (Rp Triliun)	Target Penerimaan (Rp Triliun)
2025	71 Triliun	79,3 Juta
2026	109 Triliun	80 Juta
2027	140 Triliun	81 Juta
2028	223 Triliun	82,2 Juta
2029	82 Juta	82 Juta

PKS TV DPR RI | #PKSDPRRI | @fraksiPKSDPRRI | @fraksiPKSDPRRI | @fraksiPKSDPRRI

Sumber: Laporan Interaksi PKS, Pameran Nasional 1 Grafik: Net

Dampak Program Makan Bergizi Gratis

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 0,10 persen pada tahun 2025.
- Meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup anak-anak serta ibu hamil atau menyusui khususnya dalam melawan stunting.
- Menyertap tenaga kerja sekitar 820 ribu orang sehingga berdampak pada pengurangan angka kemiskinan.

PKS TV DPR RI | #PKSDPRRI | @fraksiPKSDPRRI | @fraksiPKSDPRRI | @fraksiPKSDPRRI

Sumber: Badan Gizi Nasional 1 Grafik: Net

Target Penerima Hingga 2029:

82 Juta Orang

4 Juta Ibu Hamil

4 Juta Santri

30 Juta Balita

44 Juta Anak Usia Sekolah

PKS TV DPR RI | #PKSDPRRI | @fraksiPKSDPRRI | @fraksiPKSDPRRI | @fraksiPKSDPRRI

Sumber: Badan Gizi Nasional 1 Grafik: Net

Tantangan dan Ancaman yang Harus Diatasi

- Nominal Rp10.000 per Porsi Dinilai Belum Memadai untuk Penyediaan Makanan Bergizi
- Skema Distribusi Logistik dan Pemerataan Penerima Manfaat yang Masih Dipertanyakan
- Potensi Bahan Baku Impor yang Digunakan untuk Pemenuhan Program Makan Bergizi Gratis

PKS TV DPR RI | #PKSDPRRI | @fraksiPKSDPRRI | @fraksiPKSDPRRI | @fraksiPKSDPRRI

Sumber: Berbagi 1 Grafik: Net

Fraksi PKS Dukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis Menuju SDM Indonesia Berkualitas

Persoalan gizi bagi anak-anak masa depan bangsa ini adalah persoalan penting dan strategis. Apresiasi Presiden Prabowo dan jajaran pemerintah yang serius menyiapkan dan mengeksekusi program MBG. Kita ingin anak-anak Indonesia sehat dan cerdas baik secara intelektual, emosional dan spiritual.

Dr. H. Jazuli Juwaini, LC, MA
Ketua Fraksi PKS

PKS TV DPR RI | #PKSDPRRI | @fraksiPKSDPRRI | @fraksiPKSDPRRI | @fraksiPKSDPRRI

Sumber: Berbagi 1 Grafik: Net

Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi

Kami sudah menyiapkan bersama dalam kesimpulan di rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar BGN bisa menaga gizi dan kualitas makanan sampai kepada ibu hamil, ibu menyusui, ibu menyusui, dan siapapun yang menemai. Program MBG ini adalah program jangka panjang, sehingga dilakukannya secara bertahap. Mudah-mudahan dengan proses yang bertahap ini, modelnya terus bisa diempurnakan. Selain itu, secara bertahap bisa menyertifikasi serta mengatasi kendala-kendala misalnya distribusi logistik di daerah-daerah yang terpendek dan seterusnya.

Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS

PKS TV DPR RI | #PKSDPRRI | @fraksiPKSDPRRI | @fraksiPKSDPRRI | @fraksiPKSDPRRI

Sumber: Berbagi 1 Grafik: Net

Politisi PKS Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan

Sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat perlu dibangun untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran. Keterbukaan akan menghidupkan potensi penyelipangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Program MBG harus didukung agar keberlanjutan hingga teras dampaknya terhadap pertumbuhan SDM unggul generasi masa depan Indonesia.

Dr. Hj. Netty Prasetyani Heriyawan, S.S., M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS

PKS TV DPR RI | #PKSDPRRI | @fraksiPKSDPRRI | @fraksiPKSDPRRI | @fraksiPKSDPRRI

Sumber: Berbagi 1 Grafik: Net



image istimewa

Kecelakaan Kapal Basarnas di Perairan Tidore, Reni Astuti Sampaikan Dukacita dan Dorong Investigasi

Jakarta (08/02) --- Peristiwa kecelakaan terjadi di Perairan Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, ketika kapal milik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Ternate yang sedang beroperasi dalam pencarian seorang nelayan hilang mengalami ledakan hebat. Insiden ini mengakibatkan sejumlah korban luka-luka, bahkan ada yang meninggal dunia.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jawa Timur 1 (Surabaya-Sidoarjo), Reni Astuti, menyampaikan dukacita mendalam atas musibah tersebut.

"Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga para korban. Tragedi ini menjadi duka bagi kita semua, terutama bagi keluarga besar, Basarnas, jajaran kepolisian yang kehilangan anggotanya dalam tugas mulia," ujar Reni.

Ia turut mengapresiasi pengorbanan para petugas yang menjalankan tugas kemanusiaan demi keselamatan masyarakat.

"Saya juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi para petugas yang telah berkorban secara maksimal dalam memberikan pelayanan serta bantuan untuk masyarakat," tambah Reni.

Dalam insiden tersebut,

terdapat 11 orang yang menjadi korban, dengan rincian sebagai berikut: 3 korban meninggal dunia, yaitu: (1) haratu Mardi Haji (Anggota Dit Polairud Polda Maluku Utara) (2) iski Esa (Personel Basarnas Ternate) (3) Fadli Malagapi (Personel Basarnas Ternate)

5 korban mengalami luka-luka dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit. korban masih dinyatakan hilang. 2 korban berhasil selamat dari peristiwa tersebut.

Di sisi lain, Reni Astuti meminta Basarnas untuk segera melakukan investigasi menyeluruh guna mengungkap penyebab kecelakaan dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

"Basarnas harus melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab ledakan ini. Evaluasi menyeluruh terhadap kondisi kapal,

BERIKUTNYA >>>

Kecelakaan Kapal Basarnas di Perairan Tidore, Reni Astuti Sampaikan Dukacita dan Dorong Investigasi

« SEBELUMNYA

prosedur keselamatan, serta kesiapan peralatan operasional sangat penting agar insiden serupa tidak terulang,” tegas Reni.

Sebagai bagian dari Komisi V DPR RI yang membidangi

infrastruktur, perhubungan serta keselamatan publik, Reni juga meminta Basarnas dan instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan serta pemeliharaan rutin terhadap seluruh peralatan operasional yang digunakan dalam misi



pencarian dan penyelamatan.

“Kami berharap Basarnas dapat lebih memperketat standar operasional prosedur (SOP) dan memastikan setiap peralatan yang digunakan selalu dalam kondisi prima, sehingga keselamatan para petugas tetap terjaga saat menjalankan tugas kemanusiaan,” tambahnya.

Reni menegaskan bahwa ia bersama Komisi V DPR RI akan terus mengawal upaya evaluasi dan perbaikan sistem keselamatan dalam operasi penyelamatan oleh Basarnas, demi memastikan keselamatan dan keamanan bagi seluruh personel yang bertugas.

“Keselamatan petugas penyelamat harus menjadi prioritas. Mereka adalah garda terdepan dalam upaya pencarian dan pertolongan bagi masyarakat. Oleh karena itu, mereka juga harus mendapatkan perlindungan yang maksimal saat bertugas,” pungkask Reni.

DPR RI melalui Komisi V akan terus mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas sistem keamanan dalam setiap operasi pencarian dan penyelamatan.



“Basarnas harus melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab ledakan ini. Evaluasi menyeluruh terhadap kondisi kapal, prosedur keselamatan, serta kesiapan peralatan operasional sangat penting agar insiden serupa tidak terulang,”

RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.

Anggota Komisi V DPR RI



DPR-RI: Perlu pendalaman agar efisiensi APBN tak hambat bangun desa

Jakarta (06/02) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo mengusulkan agar pemerintah bersama DPR benar-benar melakukan pendalaman terhadap implementasi efisiensi anggaran agar nantinya pemotongan anggaran tidak menghambat perwujudan Astacita ke-6.

"Astacita yang keenam, membangun dari desa, membangun dari bawah bisa kosong. Ini desa bicarannya. Jembatan gantung adanya di desa. Ini maksud saya, sebelum kita memberikan persetujuan, saya usul kita pendalaman," kata Yanuar dalam Rapat Komisi V DPR RI bersama sejumlah kementerian, seperti Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Diketahui Astacita keenam dari Presiden Prabowo adalah membangun dari desa dan membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan oleh Yanuar untuk menanggapi paparan dari Menteri PU Dody Hanggodo mengenai rencana anggaran pembangunan jembatan gantung di tahun 2025, menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Menteri PU sebelumnya menyampaikan besaran target pembangunan jembatan gantung dan preservasi jembatan pada 2025, usai adanya efisiensi anggaran, adalah 126 kilometer.

Menurut Yanuar, besaran tersebut berpotensi membuat pembangunan jembatan di desa-desa menjadi tidak optimal.

Terkait desa, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan Kemendes PDT mema-

ngkas anggaran tahun 2025 sebesar Rp1.034.396.000.000 sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran.

"APBN tahun 2025 yang pernah kita sahkan sebesar Rp2.192.387.697.000 diefisiensi sebesar Rp1.034.396.000.000. Maka, APBN tahun 2025 Kemendes PDT setelah diefisiensi menjadi Rp1.157.991.697.000," ucap Lasarus.

Besaran pemangkasan anggaran tersebut lalu disetujui oleh Komisi V DPR RI.

"Anggaran Kemendes PDT kita setuju?" tanya Lasarus yang dijawab setuju oleh para anggota Komisi V DPR.

Meskipun begitu dalam rapat yang dihadiri langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto itu, Kemendes PDT tidak menjabarkan secara detail item ataupun program yang terdampak kebijakan efisiensi itu.

Lasarus menyampaikan hal itu akan dijabarkan oleh Kemendes PDT dan dialami oleh Komisi V DPR RI dalam rapat kerja pada pekan depan.



"Astacita yang keenam, membangun dari desa, membangun dari bawah bisa kosong. Ini desa bicarannya. Jembatan gantung adanya di desa. Ini maksud saya, sebelum kita memberikan persetujuan, saya usul kita pendalaman,"

H. YANUAR ARIF WIBOWO, S.H.

Anggota Komisi V DPR RI

Menurut dia, langkah itu ditempuh agar pembahasan di dalam rapat benar-benar terfokus pada satu kementerian, mengingat rapat pada Kamis ini diikuti tidak hanya oleh Kemendes PDT, tetapi juga oleh Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Kementerian Transmigrasi, BMKG, dan Basarnas.

Sebelumnya Presiden Prabowo secara resmi mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.



image istimewa

Fraksi PKS Setuju RUU BUMN: Sejalan dengan Asta Cita ke-5 Presiden Prabowo Memperkuat Fungsi dan Peran BUMN

Jakarta (04/02) --- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS Ismail Bachtiar mewakili Fraksi PKS menyampaikan Pandangan Mini terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rapat di Ruang Baleg DPR RI, Gedung Nusantara 1, Senin, (03/02/2025).

Menurut Ismail, Bangsa Indonesia saat ini telah melalui beberapa fase kehidupan dengan bangsa dan bernegara dengan tujuan utama adalah untuk mencapai kemakmuran bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka tata kelola yang baik di seluruh lembaga negara harus diterapkan.

Negara, lanjutnya, bertanggung jawab menyelenggarakan perekonomian nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan cara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 menyatakan 'Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat'.

"Tujuan ini dapat tercapai apabila Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki posisi yang kuat dan mandiri, sehing-

ga memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional maupun global," pungkasnya.

Terkait dengan RUU BUMN ini, kata Ismail, maka Fraksi PKS menyampaikan beberapa catatan. "Pertama, Fraksi PKS memandang bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini harus sejalan dengan Asta Cita Presiden RI, khususnya Asta Cita ke-5 yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, sehingga mendorong terwujudnya Badan Usaha Milik Negara yang lebih sehat, dan berdampak pada terciptanya perekonomian nasional yang kuat. RUU BUMN harus dapat memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan milik Negara, sehingga pengelolaan BUMN dapat selaras dengan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG)," urai Ismail.

Fraksi PKS Setuju RUU BUMN: Sejalan dengan Asta Cita ke-5 Presiden Prabowo Menguatkan Fungsi dan Peran BUMN

« SEBELUMNYA

Kedua, imbuh Ismail, Fraksi PKS memandang bahwa Pembentukan BUMN Badan Pengelola Investasi, diperlukan untuk memperkuat tata kelola, konsolidasi aset dan kekayaan Negara, sehingga terbangun BUMN berkelas dunia, yang akan memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan negara, penyediaan layanan publik, serta pertumbuhan ekonomi.

"Ketiga, Fraksi PKS

memandang bahwa seluruh kekayaan negara yang disertakan baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu badan usaha harus dikelola dengan baik dan dapat diawasi penggunaannya," urai Ismail.

Keempat, lanjut Ismail, Fraksi PKS memandang bahwa pengaturan mengenai pembentukan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan turunannya perlu sejalan dengan induk usahanya agar tercipta ekosistem usaha

yang efisien berkeadilan.

"Fraksi PKS menekankan bahwa pembentukan anak BUMN dan turunannya tidak boleh menghambat perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan tidak menjadi persoalan yang justru memberatkan keuangan bagi induk BUMN," ujarnya.

"Kelima, Fraksi PKS memandang pengaturan tentang privatisasi BUMN tidak dilakukan di sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak dan tidak dilakukan di sektor yang membahayakan pertahanan keamanan Negara. Upaya penyehatan dan pemulihan BUMN harus menjadi prioritas utama, agar BUMN lebih kompetitif," tegas Ismail.

Keenam, lanjut Ismail, Fraksi PKS memandang pentingnya Badan Usaha Milik Negara melakukan pembinaan usaha kecil dan menengah.

"Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Fraksi PKS menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dijadikan sebagai Undang-Undang dan untuk selanjutnya dapat segera diproses pada tahap berikutnya sebagaimana diatur dalam tata tertib DPR RI," tutup Anggota DPR RI dari Dalip Sulawesi Selatan II ini.



“Fraksi PKS menekankan bahwa pembentukan anak BUMN dan turunannya tidak boleh menghambat perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan tidak menjadi persoalan yang justru memberatkan keuangan bagi induk BUMN,”

ISMAIL BACHTIAR, S.K.M., M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI





image istimewa

Komisi VII FPKS Izzuddin Al-Qassam Dorong Kolaborasi Seni-Pariwisata di Maluku Utara

Jakarta (03/01) — Anggota DPR RI Komisi VII Dapil Maluku Utara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Izzuddin Al-Qassam Kasuba, menyambut positif inisiatif Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang menggandeng pekerja seni untuk mempromosikan destinasi wisata Indonesia.

Pria yang akrab disapa Qassam ini berharap program kolaborasi, termasuk konten kreatif 'The Dudas Minus One' bersama Raffi Ahmad dan klub motor selebritas, dapat menjangkau Maluku Utara serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan lokal.

"Potensi wisata Maluku Utara, mulai dari keindahan

"Potensi wisata Maluku Utara, mulai dari keindahan pantai, budaya unik, hingga sejarah rempah, harus diangkat secara masif melalui kolaborasi kreatif seperti ini. Saya mendorong Kemenpar dan pelaku seni untuk menyasar daerah kami, sekaligus melibatkan pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan komunitas lokal,"

IZZUDDIN ALQASSAM KASUBA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku Utara

pantai, budaya unik, hingga sejarah rempah, harus diangkat secara masif melalui kolaborasi kreatif seperti ini. Saya mendorong Kemenpar dan pelaku seni untuk menyasar daerah kami, sekaligus melibatkan pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan komunitas lokal," tegas Al-Qassam dalam keterangan resminya.

Al-Qassam menilai partisipasi stakeholder pariwisata setempat, seperti pengelola homestay, pemandu wisata, hingga pengrajin tradisional, menjadi kunci keberhasilan promosi.

"Program ini harus dirancang berbasis kearifan lokal agar memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat," tambah anggota legislatif PKS tersebut.

Kolaborasi dengan Rans Entertainment dan figur publik seperti Ariel 'Noah' dan Gading Marten dinilai strategis untuk menarik minat wisatawan muda.

Al-Qassam juga mengusulkan agenda spesifik, seperti eksplorasi destinasi unggulan Maluku Utara (Ternate, Tidore, Halmahera) melalui konten digital atau acara roadshow.

"Dengan sinergi antara seni, pemerintah, dan masyarakat, Maluku Utara siap menjadi hidden gem pariwisata nasional. Mari wujudkan promosi yang inklusif dan berdampak luas," pungkasnya.



Raker dengan Kemenag,

HNW Kembali Perjuangkan Realisasi Program MBG Bagi Siswa Madrasah-Pesantren

Jakarta (05/02) -- Wakil Ketua MPR-RI yang juga Anggota Komisi VIII DPR-RI Hidayat Nur Wahid, saat rapat kerja dengan Menteri Agama di Komisi 8 DPR-RI,

kembali memperjuangkan alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik di satuan pendidikan keagamaan seperti Madrasah dan Pesantren.

HNW sapaan meminta Kementerian Agama aktif memantau progres penyaluran MBG bagi siswa di sekolah-sekolah di bawah Kemenag seperti Madrasah dan Pesantren, meskipun penetapan pembagian MBG dikerjakan oleh Badan Gizi Nasional.

"Aspirasi masyarakat Madrasah dan Pesantren yang saya terima langsung saat Reses bulan Januari agar mereka mendapatkan keadilan dengan dilibatkan sebagai pihak yang berhak menerima program MBG, sudah saya sampaikan langsung kepada Menteri Agama. Alhamdulillah disepakati menjadi kesimpulan rapat agar program MBG segera diwujudkan dan atau ditingkatkan realisasinya secara adil, di satuan pendidikan keagamaan seperti Madrasah dan Pesantren," disampaikan Hidayat setelah Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI dengan Kemenag, Senin (03/02/2025).

Hydayat yang merupakan Anggota DPR-RI Dapil DKI

Jakarta II meliputi Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat ini dalam agenda reses banyak bertemu dengan tokoh-tokoh Pesantren maupun Madrasah, mereka menyampaikan aspirasi bahwa mereka belum diikutsertakan sebagai penerima program MBG, karenanya mereka menuntut keadilan, agar bisa turut merasakan program unggulan pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis.

Dirinya meminta agar terjadi keadilan antar satuan pendidikan, Kemenag harusnya memperjuangkan dan mengawal realisasi penyaluran MBG bagi siswa-siswa di satuan pendidikan di bawah tanggung jawab Kemenag, serta menyiapkan transparansi rencana penyaluran dan evaluasi pelaksanaan penyaluran program MBG.

"Saya usulkan Kemenag yang sudah diberlakukan efisiensi hingga anggarannya dipotong Rp 14,4 T, agar maksimal mengawal realisasi program MBG bagi para siswa di bawah kewenangannya, serta siapkan skema cakupan salur, misalnya tahun 2025 berapa persen madrasah/pesantren/

Raker dengan Kemenag, HNW Kembali Perjuangkan Realisasi Program MBG Bagi Siswa Madrasah-Pesantren

◀ SEBELUMNYA

pendidikan keagamaan lainnya yang akan menjadi penerima MBG, tahun 2026 berapa persen, dan seterusnya hingga 100% menerima MBG sebagaimana murid-murid yang lain menerimanya. Dan kemudian melalu evaluasi konstruktif terkait pelaksanaan program unggulan MBG ini. Sehingga para murid di Sekolah keagamaan seperti Madrasah dan Pesantren mendapatkan keadilan,

dan juga membuktikan adanya keseriusan kepedulian Pemerintah dan Kementerian Agama terhadap siswa/siswi satuan pendidikan keagamaan,” sambungnya.

Di saat yang sama, Anggota DPR-RI Fraksi PKS ini menyatakan dukungan APBN untuk program MBG sudah cukup tinggi, dan berpotensi ditambah, sehingga jangan sampai menggunakan dana zakat yang sudah jelas peruntukannya.

“Beberapa waktu lalu beredar polemik penggunaan dana zakat untuk tambahan pelaksanaan program MBG yang dibiayai oleh APBN. Saya apresiasi sikap istana melalui Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto, juga Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang tegas menolak wacana tersebut dan menegaskan bila ada kekurangan anggaran akan ditambah melalui APBN Perubahan. Maka Kemenag perlu memastikan agar dana zakat aman dan dapat digunakan untuk program bantuan bagi para mustahik di luar makan bergizi gratis yang sudah dibiayai Pemerintah melalui APBN,” pungkasnya.



“Saya usulkan Kemenag yang sudah diberlakukan efisiensi hingga anggarannya dipotong Rp 14,4 T, agar maksimal mengawal realisasi program MBG bagi para siswa di bawah kewenangannya, serta siapkan skema cakupan salur, misalnya tahun 2025 berapa persen madrasah/pesantren/pendidikan keagamaan lainnya yang akan menjadi penerima MBG, tahun 2026 berapa persen, dan seterusnya hingga 100% menerima MBG sebagaimana murid-murid yang lain menerimanya



image istimewa

**Dr. H.M. HIDAYAT
NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI



image istimewa

Fikri Faqih Dorong Bantuan Sarana Pendidikan untuk Kampus dan Pesantren di Bawah Kemenag

Tegal (03/02) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mendorong Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pendidikan bagi perguruan tinggi dan pondok pesantren di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) sebagaimana bantuan yang diberikan kepada PT di bawah Kemendikristek. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara merata.

Fikri menyebut bantuan yang diusulkan ini serupa dengan Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi Perguruan Tinggi Swasta (PPPTV-PTS) dari Kemendikbud Ristek.

Program ini memberikan bantuan kepada PTS di seluruh Indonesia melalui Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi, dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kebijakan Kampus Merdeka.

Bantuan berupa sarana dan prasarana pendidikan menjadi kunci penting dalam mendukung implementasi program ini.

"Sebelum saya pindah ke Komisi VIII, saya di komisi X dan waktu itu ada program kemitraan PPPTV-PTS berupa bantuan yang diberikan kepada Poltek Baja Kabupaten Tegal. Alhamdulillah bantuan tersam-

paikan sesuai spesifikasi. Atas nama masyarakat dari Dapil Jateng IX, saya mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Dikti-stek Prof Abdul Harris," kata Fikri saat melakukan kunjungan daerah pemilihan di kampus Politeknik Bhakti Praja (Baja) Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, baru-baru ini.

Fikri juga mengapresiasi keberhasilan Prodi Teknik Informatika Politeknik Baja Tegal yang 5 alumninya diterima sebagai ASN, baik PNS maupun PPPK.

Menurutnya, ini adalah bukti nyata bahwa program bantuan ini memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, Fikri berharap program serupa tidak dihentikan.

Fikri Faqih Dorong Bantuan Sarana Pendidikan untuk Kampus dan Pesantren di Bawah Kemenag

« SEBELUMNYA

"Perguruan tinggi kita perlu dukungan. Perlu diidentifikasi mana yang sedang berkembang di masyarakat, jangan sampai hanya karena hal-hal tertentu lantas ditutup begitu saja, kemudian menganggu program seperti ini," jelas legislator dari daerah pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes) ini.

Selain itu, Fikri menambahkan agar program serupa juga digulirkan di Kemenag, yang di dalamnya terdapat

perguruan tinggi, pendidikan dasar dan menengah, serta sebagian vokasi. Ia berharap tidak ada diskriminasi dalam penyaluran bantuan.

"Saya kira program ini meluas ke kemitraan Kemenag, mendorong supaya lembaga seperti pesantren itu disetarakan dengan pendidikan formal lain. Berarti Kemenag perlu membenahi. Kemudian yang kedua, payung hukum program perlu dibuat sehingga mereka berkembang untuk pendidikan dan masyarakat," papar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Sementara itu, Kaprodi Teknik Informatika Politeknik Baja Tegal, Aziz Azindani, mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan Fikri.

"Kami ucapkan terimakasih kepada Pak Fikri atas supportnya, pada tahun 2024, kami berhasil mendapat hibah 16 unit komputer 'all in one (AIO)' dan satu proyektor. Semoga program ini dapat kami manfaatkan untuk pembelajaran prodi Teknik Informatika, Mesin, dan Otomotif. Kami juga berharap program serupa bisa dikembangkan kembali dan bermanfaat untuk kampus swasta lainnya," jelasnya.

Aziz berharap meskipun Fikri pindah dari komisi X ke komisi VIII tetap mendukung penuh pengembangan dunia Pendidikan swasta.

"Karena pak Fikri ini asli lahir dari dunia pendidikan, menjadi PNS bersama-sama dengan para pendiri sekolah kami dan beliau juga diperbantukan di sekolah swasta, sehingga sangat paham lembaga pendidikan swasta, maka supaya tetap ingat dan tetap usaha membantu kami di Perguruan (pendidikan) swasta. Bila tanpa stimulan dari pemerintah maka kami susah untuk maju dan berkembang," pungkas Aziz.



image istimewa



"Sebelum saya pindah ke Komisi VIII, saya di komisi X dan waktu itu ada program kemitraan PPPTV-PTS berupa bantuan yang diberikan kepada Poltek Baja Kabupaten Tegal. Alhamdulillah bantuan tersampaikan sesuai spesifikasi. Atas nama masyarakat dari Dapil Jateng IX, saya mengucapkan terima kasih kepada kepada Dirjen Diktiristek Prof Abdul Harris,

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM
Anggota Komisi VIII DPR RI

Aturan Pembatasan Medsos Anak

Politisi PKS: Harus Komprehensif, Termasuk Dampak pada Kesehatan Mental

Jakarta (10/02) — Rencana pemerintah membatasi penggunaan media sosial bagi anak-anak perlu didukung dengan kebijakan yang komprehensif,

termasuk mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan mental anak.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher menekankan bahwa perlindungan anak di ranah digital tidak cukup hanya dengan pembatasan, tetapi juga harus mencakup regulasi yang lebih ketat terhadap platform digital dan keterlibatan aktif orang tua.

“Saya mendukung upaya pemerintah melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial. Upaya ini harus diikuti dengan pengaturan terhadap game online yang banyak mengandung unsur adiktif dan tidak ramah anak,” ujar Netty, Senin, (10/02).

Lebih lanjut, Netty menegaskan bahwa edukasi tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga orang tua.

“Orang tua bertanggung jawab mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan teknologi digital. Oleh sebab itu pemerintah perlu menggencarkan sosialisasi dan edukasi agar orang tua tahu cara melindungi anak dari konten yang tidak pantas dan sadar akan bahayanya,” tambahnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah untuk bersikap tegas terhadap platform digital agaremperketat verifikasi usia pengguna.

“Saat ini masih banyak anak di bawah umur yang

dengan mudah membuat akun media sosial tanpa adanya filter konten untuk anak di bawah umur. Pemerintah harus mewajibkan platform digital memiliki sistem verifikasi usia yang lebih ketat dan transparan,” tegasnya

Netty juga menyoroti dampak media sosial terhadap kesehatan mental anak, termasuk meningkatnya kasus kecemasan, depresi, dan gangguan tidur akibat paparan konten berlebihan dan cyberbullying.

“Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkontrol berkontribusi terhadap penurunan kesehatan mental anak. Kita melihat kasus cyberbullying, kecaduan media sosial, hingga gangguan tidur akibat penggunaan gadget yang berlebihan. Ini harus menjadi perhatian serius,” jelasnya.

Oleh sebab itu, ia mendorong agar platform media sosial dan game online lebih proaktif dalam menyediakan fitur-fitur yang mendukung kesehatan mental anak, seperti pembatasan waktu penggunaan, konten edukatif, dan mekanisme pelaporan konten berbahaya.

Terakhir, Netty menekankan pentingnya transparansi dari platform digital dalam menjaga keamanan anak di dunia maya.

“Kita perlu transparansi. Platform harus melaporkan secara berkala langkah-langkah yang mereka ambil dalam menjaga keamanan anak di du-



“Kita perlu transparansi. Platform harus melaporkan secara berkala langkah-langkah yang mereka ambil dalam menjaga keamanan anak di dunia digital, termasuk algoritma yang mereka gunakan untuk memfilter konten,”

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

nia digital, termasuk algoritma yang mereka gunakan untuk memfilter konten,” kata politisi PKS tersebut.

Dengan kebijakan yang komprehensif, diharapkan anak-

anak Indonesia dapat terlindungi dari dampak negatif media sosial, baik secara fisik maupun mental, sehingga tumbuh dan berkembang dengan lebih sehat di era digital ini.



Aleg PKS Alifudin Minta Kemenkes Siapkan Layanan Terbaik untuk Program Cek Kesehatan Gratis

Jakarta (08/02) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifudin, menyatakan dukungannya terhadap Program Cek Kesehatan Gratis yang akan dilaksanakan mulai 10 Februari 2025.

Program ini bertujuan memberikan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat secara cuma-cuma, mencakup berbagai jenis pemeriksaan seperti tes tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pemeriksaan lainnya.

Menurut Alifudin, program ini sangat penting untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan serta deteksi dini berbagai masalah kesehatan.

“Program Cek Kesehatan Gratis ini adalah langkah maju untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Saya sangat mendukung inisiatif pemerintah yang memberikan akses

kesehatan lebih luas dan mudah bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang mungkin tidak memiliki cukup biaya untuk pemeriksaan kesehatan rutin,” ujar Alifudin.

Alifudin menambahkan bahwa program semacam ini bisa menjadi solusi untuk masalah kesehatan yang tidak terdeteksi sejak dini, yang seringkali berkembang menjadi penyakit yang lebih serius.

Alifudin juga menekankan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada pelaksanaannya yang harus dijalankan dengan serius. Alifudin meminta kepada pihak terkait, baik Kemen-

terian Kesehatan maupun instansi yang berkompeten, untuk mempersiapkan fasilitas dan sumber daya manusia di pusat-pusat kesehatan, seperti puskesmas, dengan sebaik-baiknya.

“Kesiapan infrastruktur kesehatan di lapangan sangat krusial agar pelayanan berjalan lancar. Puskesmas dan tenaga medis harus siap memberikan pelayanan yang berkualitas dan memadai,” tambah Alifudin.

Selain itu, Alifudin mengingatkan bahwa keberhasilan program ini juga bergantung pada sosialisasi yang efektif. Masyarakat perlu diberitahu dengan jelas mengenai jadwal, lokasi, serta jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan.

“Penting untuk mengedukasi masyarakat melalui berbagai saluran informasi yang mudah diakses, agar mereka tidak hanya tahu, tetapi juga mau memanfaatkan program ini untuk menjaga kesehatan mereka,” ujar Alifudin.

Politisi asal Kalimantan Barat ini juga mengimbau agar program Cek Kesehatan Gratis ini tidak hanya berlangsung sesaat, tetapi dapat menjadi program yang berkelanjutan. Ia menyarankan agar pemerintah memperluas cakupan pemeriksaan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

“Deteksi dini adalah kunci untuk mencegah berbagai penyakit. Oleh karena itu, pemerintah harus berkomitmen untuk



“Deteksi dini adalah kunci untuk mencegah berbagai penyakit. Oleh karena itu, pemerintah harus berkomitmen untuk memastikan bahwa program seperti ini dapat terus berjalan dan lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat,”

H. ALIFUDIN, S.E., M.M

Anggota Komisi IX DPR RI

memastikan bahwa program seperti ini dapat terus berjalan dan lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat,” jelas Alifudin.

Alifudin berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, serta menjaga kesehatan mereka dengan lebih baik setelah mengikuti program ini.

“Kami di Komisi IX DPR RI mendukung penuh program ini dan akan terus memantau pelaksanaannya untuk memastikan bahwa tujuan mulia dari program ini tercapai dengan baik, pun kami ingin program ini berjalan penuh tanpa ada pemotongan anggaran,” tutupnya.



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri



image istimewa

Coretax Banyak Masalah, Aleg PKS Kholid : Evaluasi Total, Mitigasi Dampak Ke Penerimaan Negara!

Jakarta (10/02) — Sistem Coretax yang dikembangkan dengan anggaran Rp1,3 triliun, kini menjadi sumber keluhan dari wajib pajak dan dunia usaha. Alih-alih mempercepat layanan perpajakan, sistem ini justru menghadirkan berbagai gangguan teknis seperti gagal login, kesalahan data, kendala penerbitan faktur pajak, serta validasi NIK-NPWP yang bermasalah.

Menanggapi hal ini, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin (10/02), Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, meminta Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak agar melakukan evaluasi total terhadap implementasi Coretax dan tidak memaksakan sistem yang belum siap.

Ia mengingatkan bahwa jika gangguan ini terus berlanjut, dampaknya bisa merembet ke penerimaan negara akibat penurunan kepatuhan wajib pajak.

"Proyek Coretax sudah menghabiskan anggaran Rp1,3 triliun, tapi hasilnya justru saat ini menyulitkan wajib pajak. Jika sistem ini terus dipaksakan tanpa perbaikan mendasar,

kepatuhan pajak bisa terganggu dan berimbas pada penerimaan negara. Kami meminta evaluasi total dan sanksi tegas bagi vendor yang tidak memenuhi target," tegas Kholid, yang merupakan Anggota DPR RI dari Dapil Kota Depok dan Kota Bekasi.

Kholid juga menyoroti buruknya governance dalam pengelolaan proyek ini, termasuk transparansi dalam pemilihan vendor dan efektivitas pengawasan.

Menurut Kholid, Kementerian Keuangan seharusnya belajar dari kegagalan beberapa negara yang menerapkan sistem perpajakan berbasis perangkat lunak yang sudah jadi dan siap pakai atau Commercial Off-the-Shelf (COTS), seperti Kanada, Australia, dan Selandia Baru.

"Di negara-negara tersebut, sistem pajak digital berbasis COTS gagal karena tidak kompatibel dengan regulasi

Coretax Banyak Masalah, Aleg PKS Kholid : Evaluasi Total, Mitigasi Dampak Ke Penerimaan Negara!

« SEBELUMNYA

lokal, mengalami gangguan teknis berulang, dan menyebabkan pembengkakan anggaran," ungkapnya.

Kholid meminta Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak agar kembali menggunakan sistem

perpajakan yang lama sebagai langkah antisipasi dalam mitigasi implementasi Coretax, yang masih dalam proses penyempurnaan, agar tidak mengganggu kolektivitas penerimaan pajak.

"Kami mendukung digitalisasi pajak, tetapi inovasi harusnya mempermudah, bukan menambah masalah. Jangan jadi-

kan wajib pajak sebagai korban uji coba sistem yang belum matang," kata Kholid, yang juga alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Selain itu, Kholid meminta DJP memastikan interoperabilitas (kemampuan interaksi antar aplikasi) Coretax dengan sistem lama, meningkatkan uji coba teknis, serta memberikan pelatihan menyeluruh bagi pegawai pajak dan wajib pajak sebelum implementasi penuh.

Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid berkomitmen untuk mengawal dan mengawasi proyek digitalisasi perpajakan ini agar transparan, akuntabel, dan tidak merugikan negara.

Kholid menegaskan bahwa transparansi pengelolaan anggaran dan kontrak dengan vendor harus menjadi prioritas utama. Jika ditemukan kelalaian dalam pengembangan sistem ini, maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas dari semua pihak yang terlibat.

"Jika Coretax tidak segera diperbaiki, target penerimaan negara bisa terganggu. Kepatuhan pajak menurun, pembayaran tertunda, dan ekonomi akan terdampak. Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak harus segera bertindak sebelum dampaknya semakin luas!" tutup Kholid.



"Kami mendukung digitalisasi pajak, tetapi inovasi harusnya mempermudah, bukan menambah masalah. Jangan jadikan wajib pajak sebagai korban uji coba sistem yang belum matang,"

**H. MUHAMMAD
KHOLID, S.E., M.Si.**

Anggota Komisi XI DPR RI



image istimewa

Komisi XII DPR FPKS Haji Jalal Apresiasi Langkah Tegas dan Cepat Presiden Prabowo Terkait Polemik Gas LPG 3 Kg

Jakarta (04/02) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jalal Abdul Nasir, mengapresiasi sikap tegas dan cepat Presiden Prabowo Subianto dalam menangani polemik distribusi gas LPG 3 kg yang menyebabkan antrean panjang di berbagai daerah.

Jalal Abdul Nasir, yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII, menilai bahwa langkah cepat Presiden dalam merespons kelangkaan gas LPG 3 kg merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada subsidi energi tersebut.

“Kami mengapresiasi

“Kami mengapresiasi langkah cepat dan tegas yang diambil Presiden Prabowo dalam mengatasi polemik LPG 3 kg ini. Keputusan dan tindakan yang segera diambil menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat kecil,”

H. JALAL ABDUL NASIR, AK.

Anggota Komisi XII DPR RI

langkah cepat dan tegas yang diambil Presiden Prabowo dalam mengatasi polemik LPG 3 kg ini. Keputusan dan tindakan yang segera diambil menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat kecil,” ujar Jalal Abdul Nasir.

Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dengan Pertamina, untuk memastikan distribusi gas LPG 3 kg tetap berjalan lancar dan tepat sasaran. Jalal Abdul Nasir mendorong agar pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap rantai distribusi guna mencegah penimbunan dan spekulasi harga yang merugikan masyarakat.

“Kita harus memastikan bahwa subsidi yang diberikan

pemerintah benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak. Pengawasan yang ketat dan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil harus menjadi prioritas utama,” tambahnya.

Dengan adanya langkah konkret dari Presiden Prabowo, Jalal Abdul Nasir berharap bahwa antrean panjang akibat kelangkaan gas LPG 3 kg bisa segera teratasi dan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan energi sehari-hari.

Sebagaimana usulan Haji Jalal sebelumnya agar Pengecer Tetap Diberikan Kesempatan Untuk Menjual Selama Proses Registrasinya Migrasi Ke Sub Pangkalan. Untuk memastikan ketersediaan Gas Dilapangan Jelang ramadhan.



image istimewa

Meitri Citra Wardani Minta BPH Migas Kawal Distribusi dan Ketersediaan Pasokan BBM Jelang Ramadan

Jakarta (11/02) — Mobilitas masyarakat diperkirakan akan meningkat signifikan selama Ramadan dan jelang libur lebaran. Hal itu membuat konsumsi BBM diprediksi melonjak hingga 11 persen dibandingkan periode normal.

Demikian hal itu disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani se usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Senin (10/02/2025).

Mengantisipasi hal

tersebut, Meitri mengingatkan agar BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi dilakukan tepat sasaran dan mengawal ketersediaan pasokan BBM di seluruh daerah.

"Melihat potensi lonjakan mobilitas warga selama Ramadan sampai pada libur lebaran dengan segala dinamika yang terjadi selama arus mudik, BPH Migas perlu fokus memastikan agar distribusi BBM subsidi hanya diberikan kepada kendaraan-kendaraan yang berhak sebagaimana yang sudah diatur oleh regulasi. Diiringi dengan pengawasan yang ketat terhadap penyalurannya, kami berharap agar kendaraan-kendaraan yang tidak termasuk dalam kategori yang berhak menerima BBM subsidi terhindar dari risiko penyalahgunaan yang dapat merugikan orang lain yang berhak. Ini menjadi penting untuk mendukung kelancaran, kenyamanan, dan keberkahan warga yang melaksanakan perjalanan mudik ke kampung halaman," ujar Meitri.

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menekankan, BPH Migas perlu terlibat proaktif dalam menjamin ketersediaan pasokan BBM bekerjasama dengan Satuan Tugas yang dibentuk oleh Pertamina.

"Perlu dipastikan agar sejumlah layanan tambahan oleh Pertamina, khususnya di wilayah dengan tingkat permintaan energi yang tinggi, tersedia dengan memadai.

SPBU Siaga, mobil tanki siaga, motoris Pertamina, dan SPBU di sejumlah kantong keramaian perlu dipastikan dapat beroperasi dan memberikan pelayanan secara memadai tanpa kendala apapun. Pun jika ada potensi kendala, BPH Migas harus bisa mendeteksi sejak dini agar tidak menimbulkan masalah yang lebih rumit di kemudian hari, utamanya ketika puncak arus mudik," jelas Meitri.

Anggota DPR Dapil Jawa Timur VIII ini menyarankan BPH Migas untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah SPBU yang tersebar di sejumlah daerah dengan tingkat permintaan yang tinggi jelang dan selama bulan Ramadan.

"Sidak lapangan perlu dilakukan oleh BPH Migas dengan menggendeng otoritas penegak hukum semisal Polri jelang Ramadan dan Idul Fitri untuk mencegah terjadinya potensi penyimpangan penjualan BBM khususnya di kantong-kantong pengisian bahan bakar yang cukup ramai dengan tingkat kerawanan tertentu. Sidak juga dilakukan untuk memastikan stok bahan bakar betul-betul aman," usulnya.

Selain menyoroti kesiapan BPH Migas dalam mengawal distribusi dan ketersediaan pasokan BBM jelang Ramadan dan Idul Fitri, Meitri juga menyinggung soal layanan aduan BPH Migas. Selain

Meitri Citra Wardani Minta BPH Migas Kawal Distribusi dan Ketersediaan Pasokan BBM Jelang Ramadan

« SEBELUMNYA

menyampaikan apresiasi atas kinerja pengawasan, Meitri juga mendorong peningkatan layanan aduan masyarakat (dumas) milik BPH Migas.

“Terkait kinerja pengawasan lapangan berdasarkan pengaduan masyarakat, dimana dari total jumlah dumas dan permintaan informasi sebanyak 2.483 selama tahun 2024, hampir semua aduan telah diselesaikan dan hanya menyisakan 4 kasus yang masih dalam proses. Jumlah pengaduan dan layanan informasi ini 4 kali lebih banyak

dibandingkan tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan partisipasi publik (public engagement) yang menguat terkait pengawasan distribusi BBM di lapangan,” terangnya.

Kendati demikian, politisi PKS ini menilai masih terdapat celah yang masih harus disempurnakan terkait keterbukaan informasi publik, utamanya mengenai proses penanganan aduan oleh BPH Migas.

“Pertanyaannya adalah proses penyelesaian aduan atau tindak lanjutnya sampai pada tahap apa? apakah sebatas menyampaikan surat

tindak lanjut dugaan penyalahgunaan BBM ke Polda setempat ataukah betul-betul sampai pada penindakan oleh BPH Migas bersama instansi terkait hingga tuntas berdasarkan aduan tersebut? Kesenjangan informasi ini yang membuat masyarakat kurang puas sehingga perlu ada pembenahan,” tegas Meitri.

Lebih lanjut, Meitri mendorong agar layanan aduan BPH Migas ditingkatkan. Menurutnya, hal itu penting dilakukan dengan mempertimbangkan tren kenaikan jumlah aduan masyarakat yang meningkat dari 638 laporan pada tahun 2023 menjadi 2.487 laporan pada 2024.

“Penyempurnaan perlu dilakukan pada sejumlah aspek, mulai dari ketersediaan personel humas atau perangkat yang memadai untuk merespons segala aduan atau laporan secara memadai hingga penyediaan informasi terkait progress dari tindak lanjut laporan. Untuk itu, perlu disediakan layanan dashboard khusus yang bisa diakses secara umum oleh penyedia layanan agar para pelapor dapat memantau sudah sejauh mana aduan mereka tersebut diproses. Ini sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme BPH Migas dalam menjalankan fungsi pelayanan publik,” pungkasnya.



“Perlu dipastikan agar sejumlah layanan tambahan oleh Pertamina, khususnya di wilayah dengan tingkat permintaan energi yang tinggi, tersedia dengan memadai.

SPBU Siaga, mobil tanki siaga, motoris Pertamina, dan SPBU di sejumlah kantong keramaian perlu dipastikan dapat beroperasi dan memberikan pelayanan secara memadai tanpa kendala apapun.

**Hj. MEITRI CITRA
WARDANI, S.H.**

Anggota Komisi XI DPR RI





image istimewa

Politisi PKS Muh Haris Desak Kementerian ESDM Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg: Rakyat Jangan Dibebani

Jakarta (03/02) --- Kelangkaan gas LPG 3 kilogram (kg) yang terjadi di berbagai daerah sejak awal Februari 2024 memicu keprihatinan Muh Haris, anggota Komisi XII DPR RI.

Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret agar masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro tidak semakin terbebani akibat sulitnya mendapatkan LPG subsidi.

Muh Haris menyoroti kebijakan pemerintah yang melarang penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer sejak 1 Februari 2024. Aturan ini mengharuskan masyarakat membeli LPG subsidi hanya melalui pangkalan resmi yang ditunjuk PT Pertamina.

Akibatnya, antrean panjang di pangkalan menjadi pemandangan umum, sementara harga di pasar gelap melonjak tajam.

Sebenarnya, kebijakan untuk menjual LPG 3 kg hanya melalui sub-penyalur resmi ini cukup bagus, karena bisa lebih mudah mengontrol harga yang terkadang lebih tinggi dari HET oleh pengecer.

Untuk itu, Pemerintah meminta semua pengecer untuk segera mengurus NIB agar bisa naik kelas menjadi sub-penyalur resmi dan bisa menjual LPG 3 kg lagi.

Akan tetapi, faktanya di lapangan banyak pengecer yang tidak memahami kebijakan ini

karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah, sehingga mereka bingung ketika supplai dari Pertamina dihentikan. Konsekuensinya, masyarakat yang biasa membeli ke pengecer jadi kesulitan mendapatkan LPG 3 kg tersebut.

"Jika memang tidak bisa dibilang langka, mengapa antrean panjang terjadi di berbagai daerah? Jangan sampai kebijakan yang bertujuan baik justru menyulitkan rakyat kecil," ujar Muh Haris di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Senin (03/02/2024).

Berdasarkan data yang dihimpun, realisasi penyaluran LPG 3 kg di Jakarta pada tahun 2024 mencapai 414.134 metrik ton (MT). Namun, untuk tahun 2025, pemerintah justru menurunkan kuota menjadi 407.555 MT. Pemangkasan ini dinilai berpotensi memperparah kelangkaan, terutama di wilayah dengan konsumsi tinggi.

Muh Haris juga menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahil Lahadalia, yang menyebut bahwa tidak ada kelangkaan, melainkan hanya

Politisi PKS Muh Haris Desak Kementerian ESDM Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg : Rakyat Jangan Dibebani

« SEBELUMNYA

pembatasan pembelian. Menurutnya, realitas di lapangan berkata lain. Banyak masyarakat mengeluhkan LPG subsidi yang sulit didapat, bahkan beberapa pelaku usaha mikro harus menghentikan produksi akibat ketiadaan stok gas.

Sebagai anggota DPR yang membidangi energi, lingkungan, dan investasi, Muh Haris mendesak pemerintah dan PT Pertamina untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan distribusi LPG 3 kg. Ia mengusulkan empat langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini.

"Pertama, pemerintah harus menyesuaikan kuota LPG 3 kg agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro. Pengurangan kuota justru berpotensi meningkatkan keresahan dan spekulasi di pasar," ungkapnya.

Kedua, imbuhan Muh Haris, evaluasi terhadap mekanisme distribusi harus segera dilakukan. Jika sistem distribusi melalui pangkalan resmi menimbulkan kendala, maka pemerintah perlu mencari solusi yang lebih fleksibel tanpa mengorbankan efektivitas subsidi.

"Ketiga, pengawasan harga di lapangan harus diperketat.

Kelangkaan LPG 3 kg berpotensi dimanfaatkan oleh spekulan untuk menaikkan harga, yang pada akhirnya semakin memberatkan masyarakat. Pemerintah harus memastikan harga tetap stabil dan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan," jelasnya.

Keempat, lanjutnya, sosialisasi mengenai sistem pembelian LPG 3 kg harus dilakukan secara masif. Banyak masyarakat yang masih kebingungan dengan aturan baru ini, sehingga perlu ada edukasi yang lebih jelas agar mereka tidak kesulitan mendapatkan LPG subsidi.

Muh Haris menegaskan bahwa DPR akan segera meminta PT Pertamina dan Kementerian ESDM untuk menjelaskan kondisi sebenarnya dan langkah apa yang sudah diambil untuk mengatasi permasalahan ini.

"Kami akan memastikan kebijakan distribusi LPG 3 kg benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai masyarakat kecil dikorbankan akibat kebijakan yang kurang matang," tegasnya.

Ia berharap pemerintah dapat segera merespons situasi ini dengan cepat dan tepat. Kelangkaan LPG subsidi, jika dibiarkan berlarut-larut, bisa berdampak luas terhadap ekonomi rumah tangga dan usaha kecil yang bergantung pada bahan bakar tersebut.



Sosialisasi mengenai sistem pembelian LPG 3 kg harus dilakukan secara masif. Banyak masyarakat yang masih kebingungan dengan aturan baru ini, sehingga perlu ada edukasi yang lebih jelas agar mereka tidak kesulitan mendapatkan LPG subsidi.

Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I



Anggota FPKS Nevi Zuairina Dorong Penanganan Sampah Berkelanjutan dan Optimalisasi Perdagangan Karbon

Jakarta (08/02) --& Anggota DPR RI Komisi XII dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya langkah konkret dalam mengatasi persoalan sampah dan memperkuat perdagangan karbon sebagai bagian dari strategi nasional menuju ekonomi hijau.

Hal ini disampaikannya di Jakarta setelah mengevaluasi hasil rapat-rapat di DPR dengan mitra kerjanya.

"Masalah sampah di Indonesia semakin kompleks, dengan timbulan sampah yang terus meningkat mencapai 69,7 juta ton pada tahun 2023, di mana sekitar 33% dari total tersebut tidak dikelola dengan baik. Ini adalah tantangan besar yang harus segera diatasi dengan solusi konkret dan kebijakan yang berpihak pada lingkungan," ujar Nevi Zuairina.

Politisi PKS ini menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai konsep Reduce, Reuse, Recycle (3R) serta pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih

modern dan ramah lingkungan.

"Kita harus mendorong pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) yang sesuai standar serta fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi yang lebih efisien dan berkelanjutan," tambahnya.

Selain itu, Nevi juga menyoroti meningkatnya jumlah sociopreneur di bidang pengelolaan sampah yang telah mencapai 209 unit dengan omset mencapai Rp 24 miliar per tahun.

"Ini adalah bukti bahwa pengelolaan sampah dapat menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, kita harus terus mendukung dan memperluas program pemberdayaan ini," tegasnya.

Terkait perdagangan

karbon, Nevi Zuairina menyoroti pentingnya partisipasi aktif Indonesia di pasar karbon global sebagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Nevi pun menyambut baik inisiatif Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) yang telah mencatat transaksi senilai Rp84 miliar dengan total emisi yang diperdagangkan sebesar 7,1 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2024.

"Pasar karbon harus menjadi instrumen strategis bagi Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi. Namun, kita juga harus memastikan adanya regulasi yang kuat agar transaksi ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan ekonomi nasional," jelas legislator asal Sumbang II ini.

Sebagai bagian dari Komisi XII yang membidangi energi dan lingkungan, Nevi Zuairina berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan terkait pengelolaan sampah dan perdagangan karbon guna menciptakan



"Pasar karbon harus menjadi instrumen strategis bagi Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi. Namun, kita juga harus memastikan adanya regulasi yang kuat agar transaksi ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan ekonomi nasional,"

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi XII DPR RI

lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Lebih lanjut, Nevi menegaskan bahwa keberpihakan fiskal dan investasi yang cukup sangat diperlukan dalam mendukung upaya pelestarian

lingkungan.

"Kita harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program lingkungan hidup tidak mengalami pemangkasan yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan berkelanjutan," pungkasnya.



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Bahagia Menyambut
RAMADHANA
KAREEM 1446 H

*Ayo Saling
Berbagi &
Peduli*



image istimewa

Setujui Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, FPKS DPR: Demi Kehidupan Kenegaraan Demokratis Konstitusional

Jakarta (03/02) --- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Reni Astuti mewakili Fraksi PKS menyampaikan pandangan mini Fraksi PKS tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dalam sidang yang digelar di ruang Baleg DPR RI, Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (03/02/2025).

Dalam kesempatan tersebut Reni memaparkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lingkungan internal DPR dan untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai tata tertib yang mengatur susunan dan kedudukan, hak dan kewajiban, serta pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta alat kelengkapannya.

"Beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib adalah yakni Pertama, Fraksi PKS berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati agar tidak terjadi kontra produktif dalam pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta alat kelengkapannya," papar Anggota Komisi V DPR RI ini.

Kedua, imbuh Reni, Fraksi PKS berpendapat bahwa penambahan kewenangan DPR sampai tahap evaluasi pejabat publik menjadi sangat luas karena pejabat publik memiliki mekanisme pertanggungjawaban jabatan masing-masing berdasarkan peraturan

Setujui Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, FPKS DPR : Demi Kehidupan Kenegaraan Demokratis Konstitusional

« SEBELUMNYA

perundang-undangan, sehingga diperlukan kajian pendalaman terkait dengan usulan penambahan pasal 228A dalam Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib ini.

"Ketiga, Fraksi PKS mengusulkan agar penambahan Pasal 228A Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dengan memasukkan prasyarat. Misalnya evaluasi oleh DPR terhadap pejabat publik hasil pengisian jabatan oleh DPR hanya bisa dilakukan dalam kondisi tertentu yang urgen seperti adanya dugaan Tindak

Pidana, terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh pihak yang berwenang, atau adanya pelanggaran etik berat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan," ujar Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur I ini.

Keempat, kata Reni, Fraksi PKS mengusulkan bahwa dalam melakukan evaluasi, DPR harus terlebih dahulu memanggil pejabat publik yang dimaksud untuk memberikan haknya membela diri dengan meminta penjelasan melalui rapat di Komisi DPR.

"Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan evaluasi berjalan secara transparan, objektif, dan mengedepankan asas praduga tak bersalah," tandasnya.

Kelima, lanjut Reni, FPKS menilai perlu ada penjelasan

mengenai ruang lingkup dan batasan 'evaluasi' yang dimaksud dalam Pasal 228 A, apalagi disebutkan bersifat mengikat. Apakah evaluasi yang dimaksud hanya mencakup pemanggilan ke Komisi DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan ataupun sampai memberikan rekomendasi 'pemberhentian' dan 'penggantian' pejabat yang dimaksud sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

"Dengan demikian, hasil akhir dan tindak lanjut dari evaluasi terhadap pejabat publik yang ditetapkan oleh DPR ini, menjadi lebih jelas dan terukur," ungkap Reni.

"Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapakan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menyetujui dengan catatan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib untuk ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tutup Reni.



Perlu ada penjelasan mengenai ruang lingkup dan batasan 'evaluasi' yang dimaksud dalam Pasal 228 A, apalagi disebutkan bersifat mengikat. Apakah evaluasi yang dimaksud hanya mencakup pemanggilan ke Komisi DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan ataupun sampai memberikan rekomendasi 'pemberhentian' dan 'penggantian' pejabat yang dimaksud sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.

Anggota Badan Legislasi DPR RI



image istimewa

Kecam Keras Pidato Trump, Ketua BKSAP DPR Mardani: Pembangkangan Hukum dan Norma Internasional

Jakarta (07/02) --- Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengecam dengan keras atas rencana Trump yang dinilainya sebagai pembangkangan atas hukum, parameter, dan norma internasional.

Menurut Politisi PKS ini, apa yang disampaikan Trump beberapa waktu lalu mengundang reaksi dari berbagai kalangan.

Lebih lanjut Mardani mengatakan bahwa ide Trump itu akan menghapus hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

"Ide itu juga dipandang oleh politikus PKS tersebut sebagai mendukung rencana Israel melakukan pembersihan kelompok etnis," ujarnya.

Mardani Ali Sera juga menyoroti pengusiran dan pendudukan Gaza, bila diputuskan dan dilaksanakan, akan melanggar kewajiban AS di muka hukum Internasional.

Anggota Komisi II DPR RI asal Dapil DKI Jakarta I mende-sak AS dan semua pihak mema-tuhi landasan hukum interna-sional, di antaranya Konvensi Jenewa 1949, yang melarang pemindahan paksa penduduk dari wilayah yang diduduki.

"Baik Amerika Serikat ma-upun Israel sudah meratifikasi konvensi ini, sehingga yang mereka lakukan melanggar

aturan internasional yang mereka sendiri juga sudah sepakati," ujarnya.

Selain itu, Mardani juga menyitir Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (Pasal 7 dan 8) yang di antaranya menyatakan bahwa "Pemindahan, secara langsung atau tidak langsung, oleh Kekuasaan Pendudukan atas sebagian penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya, atau deportasi atau pemindahan seluruh atau sebagian penduduk wilayah yang diduduki ke dalam atau ke luar wilayah ini".

"Ini dapat diartikan sebagai kejahatan perang. Pernyataan Trump mengindikasikan bahwa Amerika Serikat merasa memiliki kekuasaan Pendudukan atas tanah Palestina dalam jangka panjang," tandasnya.

Mardani juga mengingatkan AS dan Israel bahwa genosida adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang diatur dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman

Kecam Keras Pidato Trump, Ketua BKSAP DPR FPKS Mardani : Pembangkangan Hukum dan Norma Internasional

« SEBELUMNYA

Kejahatan Genosida yang disahkan Majelis Umum PBB pada tahun 1948, di mana AS dan Israel adalah negara penandatangan konvensi tersebut.

"Pelaku genosida dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara, denda, dan penyitaan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang memang memiliki kewenangan hukum untuk mendakwa pelaku genosida," tegas Mardani.

Mardani juga mendesak kepada Pemerintah Indonesia

untuk mengambil sikap tegas dalam menolak rencana ini serta menggagalkan dukungan Internasional bagi rakyat Palestina.

"Kita harus menekan Israel agar mematuhi berbagai hukum internasional melalui diplomasi bilateral dan multilateral, serta mekanisme internasional lainnya. Jangan sampai tercipta kesan bahwa gencatan senjata yang sementara ini menjadi cuci dosa atas kejahatan Israel," urainya.

Lebih jauh Mardani menyatakan bahwa Indonesia perlu terus menjalin dukungan dengan negara-negara di PBB untuk

menaati dan menjalankan keputusan ICC dan ICJ dengan terus menuntut Israel dan pimpinannya terhadap kejahatan genosida, apartheid, dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya.

"Saya menyerukan kepada Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan Liga Arab, untuk menolak rencana ini dan mengambil langkah-langkah diplomatik guna mencegah pemindahan paksa warga Palestina," pungkasnya.

Mardani juga menyerukan masyarakat global untuk terus memberikan dukungan bagi rakyat Palestina agar hak mereka atas tanah airnya tetap dihormati.

"Hak untuk tinggal di tanah air adalah hak fundamental yang tidak bisa diganggu gugat. Kami berdiri bersama rakyat Palestina dalam perjuangan mereka untuk keadilan dan hak asasi manusia!"

Terakhir, Mardani menegaskan komitmen BKSAP DPR RI dalam forum-forum persidangan internasional bahwa Indonesia akan senantiasa mendukung perjuangan Palestina dalam mempertahankan hak-haknya, utamanya kemerdekaan Palestina berdasarkan prinsip solusi dua negara dengan batas wilayah 1967, termasuk Yerusalem Timur sebagai ibukota Palestina.

Sebelumnya dalam



"Kita harus menekan Israel agar mematuhi berbagai hukum internasional melalui diplomasi bilateral dan multilateral, serta mekanisme internasional lainnya. Jangan sampai tercipta kesan bahwa gencatan senjata yang sementara ini menjadi cuci dosa atas kejahatan Israel,"

Dr. H. MARDANI, M.Eng

Ketua Badan Koordinasi Antar Parlemen DPR RI

konferensi Pers yang dihelat bersama PM Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih (4/2), Presiden Donald Trump menyebut AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan nantinya akan bekerja di sana juga. Presiden AS ke-45 dan ke-47 tersebut juga menyampaikan

akan 'memilikinya' dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warga Palestina yang ada di sana ke negara-negara lainnya. Dia bahkan menyebut relokasi warga Gaza itu akan dilakukan 'secara permanen'.



image istimewa



Silaturahmi dengan Dubes Yordania, Syahrul Aidi Bahas Peluang Beasiswa hingga Situasi di Timteng

Jakarta (05/02) --- Anggota DPR RI Dapil Riau II dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat bertemu dengan Duta Besar (Dubes) Yordania di Jakarta.

Silaturahmi ini dimanfaatkan membahas beberapa hal penting terkait kondisi Timur Tengah hingga peluang beasiswa dari Kerajaan Yordania untuk mahasiswa Indonesia.

Pertemuan yang diselenggarakan pada Senin (03/02/2025) di Kantor Kedubes Yordania di Jakarta.

Syahrul Aidi diterima langsung oleh Dubes Yordania Sudah Adalah al Omoush. Syahrul Aidi tampak mengenakan peci dengan jas hitam dan dasi merah sementara Dubes Yordania menggunakan batik.

Usai pertemuan, Syahrul Aidi mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan upaya beliau untuk menjalin komunikasi yang intens dengan negara sahabat. Kerajaan Yordania merupakan negara yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia di wilayah Timur Tengah.

"Ada beberapa yang kita bicarakan tadi, saling bertukar kabar tentang situasi dalam negeri masing-masing. Kemudian kita juga membicarakan kemitraan Indonesia-Yordania dengan Indonesia. Salah satunya yang penting kita bahas adalah

sektor pendidikan. Wilayah timur tengah merupakan primadona tujuan belajar pelajar Indonesia," kata Syahrul Aidi melalui keterangan resminya.

Dia menerangkan bahwa Kerajaan Yordania membuka pintu seluas-luasnya bagi pelajar Indonesia. Kerajaan Yordania membuka peluang beasiswa bagi pelajar Indonesia. Tentu dengan berbagai ketentuan yang berlaku.

"Kelebihan belajar di Yordania ini ada beberapa, sistem pendidikan lebih modern, biaya pendidikan dan

hidup terjangkau, adanya beasiswa, hingga akses ke situs bersejarah islam masa lalu. Tentu ini jadi daya tarik. Apalagi Kerajaan Yordania memberikan bantuan pendidikan yang luar biasa tentu itu makin menarik," kata Syahrul Aidi.

Selain membicarakan beberapa sektor, mereka juga tidak lupa membicarakan situasi terkini di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Saling bertukar pikiran dan gagasan seperti arah Perdamiaan sehingga Palestina cepat keluar dari konflik dengan Israel.

"Seperti Indonesia, Kerajaan Yordania turut mendorong perdamaian di Timur Tengah, khususnya Palestina. Kita berharap situasi yang merugikan bagi warga Palestina khususnya di Gaza segera berakhir," tutupnya.

"Kelebihan belajar di Yordania ini ada beberapa, sistem pendidikan lebih modern, biaya pendidikan dan hidup terjangkau, adanya beasiswa, hingga akses ke situs bersejarah islam masa lalu. Tentu ini jadi daya tarik. Apalagi Kerajaan Yordania memberikan bantuan pendidikan yang luar biasa tentu itu makin menarik,"

**Dr. H. SYAHRUL AIDI
MAAZAT, Lc., M.A.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau II



image istimewa

Riyono Capping: Hadir Peringati HPN bersama 39 Media Lokal di Magetan

Magetan (10/02) --- Hari Pers Nasional menjadi refleksi bagi insan pers sebagai pilar demokrasi Indonesia dan juga lokal. Kebebasan pers saat ini telah menjadikan perkembangan dunia media sosial berkembang sangat cepat.

Medsos mulai dari media cetak sampai media online memberikan informasi serta berbagai ragam pengetahuan yang mendidik dan juga kadang merugikan, ada hoax yang tidak tertangkal dan rendahnya literasi masyarakat kita.

"Hari pers bagi saya adalah hari kebersamaan dan edukasi bagi insan pers dan juga masyarakat untuk meningkatkan literasi kita semua. Baik pejabat ataupun rakyat," papar Riyono, Aleg DPR FPKS dapil Magetan

Kehadiran Riyono Capping di peringatan Hari Pers Nasional oleh Kominfo Kab Magetan diselenggarakan di Pasar Baru dalam suasana santai dan penuh keakraban.

Kepala Dinas Kominfo, Cahaya yang memberikan pengantar Tema Kedaulatan Pangan menjadi tema menarik bagi semua insan pers.

"Saya bersama teman-teman media lokal dan nasional dekat, saling membutuhkan dan bekerjasama," tambah Riyono.

Setidaknya ada 39 media lokal resmi yang terdaftar hadir di acara malam itu. Kehadiran media lokal akan semakin menambah keberagaman informasi yang bisa di akses rakyat.

Kunjungan dapil Riyono capping sebagai bagian tanggungjawab sebagai aleg asli Magetan untuk kemajuan Kab Magetan.

"Hari pers bagi saya adalah hari kebersamaan dan edukasi bagi insan pers dan juga masyarakat untuk meningkatkan literasi kita semua. Baik pejabat ataupun rakyat,"

RIYONO, S.Kel., M.Si.

Anggota Komisi IV DPR RI

Bencana Banjir di Lombok

Aleg PKS Abdul Hadi Berkoordinasi dengan Mitra Komisi V

Jakarta (10/02) — Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Pulau Lombok sepanjang hari Senin (10/2/2025) telah menyebabkan banjir di beberapa wilayah.

Sebagai bentuk respons cepat, Anggota DPR RI Komisi V, Abdul Hadi dari Fraksi PKS Dapil NTB 2 (Pulau Lombok), segera berkoordinasi dengan mitra Komisi V, termasuk Badan SAR Nasional (Basarnas), agar dapat segera bergerak membantu masyarakat yang terdampak.

“Kami telah berkoordinasi dengan Basarnas agar segera bergerak cepat dalam membantu masyarakat yang terdampak banjir. Selain itu, kami dari Komisi V yang membidangi infrastruktur juga secara berkala dan bertahap akan berupaya membenahi permasalahan ini bersama pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU),” ujar Abdul Hadi di Gedung DPR RI Senayan, Senin, (10/02).

Abdul Hadi menyoroti berbagai faktor yang memperparah kondisi banjir di Lombok, seperti penyempitan sungai akibat pembangunan di pinggir sungai, pembuangan sampah yang sembarangan, serta minimnya pengamanan tebing sungai. Hal ini menyebabkan erosi yang mengancam pemukiman warga di sekitar aliran sungai.

“Kondisi sungai yang semakin menyempit dan banyaknya pembangunan di pinggir sungai memperburuk aliran air. Selain itu, masih banyak sungai di wilayah kita yang belum memiliki pengamanan tebing, sehingga mengakibatkan erosi yang mendekati pemukiman warga,” tambah Politisi PKS asal

Lombok ini.

Sebagai wakil rakyat dari Pulau Lombok, Abdul Hadi turut menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah banjir yang menimpa masyarakat. Ia berharap agar kondisi ini dapat segera teratasi dengan langkah-langkah yang tepat dan berkelanjutan.

“Kami turut berduka atas musibah ini dan berharap masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan serta ketabahan. Semoga masalah ini bisa segera teratasi dengan baik, saya juga akan segera turun ke lokasi selepas tugas saya di Jakarta” ucapnya.

Lebih lanjut, Abdul Hadi mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat, untuk bekerja sama dalam menangani banjir ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang untuk mencegah bencana serupa terjadi kembali di masa depan.

“Kami berharap semua pihak bahu-membahu dalam menangani musibah banjir ini. Selain penanganan darurat saat ini, kita juga harus memikirkan solusi jangka panjang agar kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari,” tutup Abdul Hadi.



“Kondisi sungai yang semakin menyempit dan banyaknya pembangunan di pinggir sungai memperburuk aliran air. Selain itu, masih banyak sungai di wilayah kita yang belum memiliki pengamanan tebing, sehingga mengakibatkan erosi yang mendekati pemukiman warga,

ABDUL HADI, S.E., M.M.

Anggota Komisi V DPR RI

Aleg PKS Fikri Faqih Minta Guru Swasta Lebih Diperhatikan dan Perguruan Tinggi Disetarakan

Brebes (10/02) — Anggota DPR RI, Abdul Fikri Faqih, meminta tiga Kementerian untuk berkoordinasi dalam hal perhatian kepada guru swasta.

Tiga kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian pendidikan tinggi riset dan sains (Kemendikristek).

Hal itu disampaikan dalam seminar nasional bertajuk 'Motret Kebijakan Baru Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Keagamaan' yang digelar pada Sabtu (8/2/2025) di STIT Alhikmah Benda, Sirampog, Brebes, Jawa Tengah.

"Saat ini perhatian terhadap guru swasta oleh pemerintah kurang, utamanya terkait kesejahteraan mereka," kata Fikri.

Berbagai poin kesejahteraan tersebut diantaranya Gaji dan tunjangan, dimana guru

swasta seringkali menerima gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan guru negeri, bahkan untuk kualifikasi dan pengalaman yang sama.

Selain itu, tunjangan-tunjangan seperti tunjangan profesi guru (TPG) juga tidak semua dapat diakses oleh guru swasta.

Tak hanya itu, kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru swasta juga masih terbatas. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pengajaran dan karir mereka.

Fikri, sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang membicarakan agenda, sosial, dan pemberdayaan perempuan, Fikri menilai perspektif khusus tentang Pendidikan. Dia menyoroti

pentingnya penyeteraanan antara perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi agama.

Penyeteraanan ini bukan hanya soal status, tetapi juga menyangkut kualitas dan kesempatan yang sama bagi mahasiswa, dan juga dari sisi maupun peluang beasiswa kuliah bagi mahasiswanya.

Dari sisi fasilitas, Perguruan tinggi agama, terutama yang swasta, seringkali memiliki fasilitas yang kurang memadai dibandingkan dengan perguruan tinggi umum negeri. Penyeteraanan fasilitas ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan modern bagi mahasiswanya.

"Kemudian Ketersediaan beasiswa bagi mahasiswa perguruan tinggi agama juga perlu ditingkatkan. Banyak mahasiswa berpotensi dari keluarga kurang mampu yang terkendala biaya untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi agama," ujar legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Di sisi lain, Fikri menilai kurikulum di perguruan tinggi agama juga perlu terus dikembangkan agar relevan dengan kebutuhan zaman dan dapat menghasilkan lulusan yang kompetitif di pasar kerja.

"Penyeteraanan antara perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi agama adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan.



Dengan fasilitas yang memadai, beasiswa yang cukup, kurikulum yang relevan, dan pengakuan yang setara, mahasiswa dari perguruan tinggi agama akan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan,"

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Anggota Komisi VIII DPR RI

Dengan fasilitas yang memadai, beasiswa yang cukup, kurikulum yang relevan, dan pengakuan yang setara, mahasiswa dari perguruan tinggi agama akan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan," jelasnya.

Selain itu, dalam seminar tersebut Fikri juga menyoroti perombakan struktur Kementerian Pendidikan di era pemerintahan Prabowo.

"Dulu Kemendikbudristek, sekarang dipecah jadi tiga,

yakni Kementerian Dikdasmen, Kementerian Dikti, dan Kementerian Kebudayaan," ujarnya.

Ia juga menyebut kurikulum Merdeka era Menteri Nadiem Makarim yang dinilai belum final dan masih dalam tahap transisi.

"Ada peta jalan pendidikan, tapi belum final sudah masa transisi,"pungkas legislator dari daerah pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) ini.



image istimewa

Inspirasi Kebangsaan: STMIK Antar Bangsa Gelar Kuliah Umum Bersama Habib Idrus Salim Al-Jufri

Tangerang (10/02) -- STMIK Antar Bangsa menggelar kuliah umum bertajuk 'Islam dan NKRI: Membangun Harmoni dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika' di Aula Kampus.

Acara ini menghadirkan Habib Idrus Salim Al-Jufri, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, sebagai narasumber utama.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa diajak memahami peran nilai-nilai Islam dalam menjaga persatuan bangsa.

Acara diawali dengan lantunan lagu Indonesia Raya dan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, menciptakan suasana penuh khidmat.

Ketua STMIK Antar Bangsa, Anur Fajri, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Habib Idrus serta peran Fraksi PKS dalam mendukung mahasiswa melalui program KIP Kuliah.

"Kami berharap kolaborasi seperti ini terus berlanjut untuk mendukung kemajuan pendidikan anak bangsa," ujarnya.

Turut hadir dalam acara ini Tarmizi As Shidia, Pimpinan Daarul Qur'an, didampingi sang istri, Maryati.

Dalam pesannya, Tarmizi menekankan pentingnya kediplinan bagi mahasiswa dalam menuntut ilmu.

"Menjadi mahasiswa bukan sekadar hadir dan absen. Ketekunan dalam belajar, me-

nyimak ilmu dari dosen, serta mengerjakan tugas dengan serius adalah kunci keberhasilan. Dengan itu, meraih kelulusan dengan hasil terbaik bukanlah hal mustahil," tuturnya.

Acara ini juga dihadiri sejumlah tokoh pendidikan dan perwakilan lembaga, antara lain: Rizki Aminullah (Pengurus Yayasan Bina Putra Putri Bangsa), Muhammad Bisry (Direktur LSP Daarul Qur'an), Subhiyanto, (Biro Kemahasiswaan STMIK Antar Bangsa), Kepala SMK Muhammadiyah 2 Kota Tangerang, serta Kepala SMK Teknik Informatika YPML.

Kehadiran mereka menjadi bukti dukungan lintas institusi dalam membangun semangat kebangsaan dan harmoni sosial di kalangan mahasiswa.

Dalam kuliah umumnya, Habib Idrus Salim Al-Jufri menegaskan bahwa Islam dan kebangsaan bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi.

"Islam mengajarkan kita untuk menjaga persaudaraan, menghormati perbedaan, serta berkontribusi nyata bagi

Inspirasi Kebangsaan: STMIK Antar Bangsa Gelar Kuliah Umum Bersama Habib Idrus Salim Al-Jufri

« SEBELUMNYA

kemajuan NKRI,” ungkapnya.

Ia juga mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad:

“Wahai manusia, beritahlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahmi, dan

sholallah saat manusia terlelap. Dengan itu, kalian akan masuk surga dengan selamat.”

Menurutnya, hadis ini sangat relevan dalam membangun harmoni sosial, terutama melalui aksi nyata seperti gotong royong dan penghormatan terhadap keberagaman.

Selain berbicara

mengenai kebangsaan, Habib Idrus juga memberikan motivasi bagi mahasiswa agar terus mengasah potensi akademik dan karakter.

“Jadilah generasi yang unggul, tidak hanya dalam prestasi akademik, tetapi juga dalam menjunjung nilai-nilai luhur bangsa,” pesannya.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan, Habib Idrus menyerahkan Beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) kepada mahasiswa STMIK Antar Bangsa.

Beasiswa ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap generasi muda yang memiliki potensi akademik, namun terkendala secara ekonomi.

Kuliah umum ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk semakin memahami bahwa menjaga persatuan dan berkontribusi bagi negeri adalah bagian dari ibadah.

“Kami semakin sadar bahwa menjaga NKRI adalah bagian dari pengamalan nilai-nilai Islam. Ini memotivasi kami untuk lebih aktif dalam kehidupan kampus dan masyarakat,” ujar Nisa, salah satu mahasiswa peserta kuliah umum.

Melalui kegiatan ini, STMIK Antar Bangsa berharap para mahasiswa semakin memotivasi untuk menjadi agen perubahan yang mengedepankan nilai kebangsaan, dialog, serta kontribusi nyata bagi Indonesia yang harmonis dan maju.



“Menjadi mahasiswa bukan sekadar hadir dan absen. Ketekunan dalam belajar, menyimak ilmu dari dosen, serta mengerjakan tugas dengan serius adalah kunci keberhasilan. Dengan itu, meraih kelulusan dengan hasil terbaik bukanlah hal mustahil



image istimewa

**HABIB IDRUS SALIM
ALJUFRI, Lc., M.B.A.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten III



Hadiri Sarasehan Petani PUI, Haji Jalal Dorong Ketahanan Pangan dengan Metode SPI

Bekasi (09/02) -- Anggota DPR RI Fraksi PKS Komisi XII, H. Jalal Abdul Nasir, Ak. menghadiri Sarasehan Petani PUI di Kabupaten Bekasi.

Dalam forum ini, ia menegaskan perlunya perhatian dari Kementerian terkait, baik Kementerian Pertanian (Deptan) maupun Kementerian Pekerjaan Umum (Dep PU), dalam mendukung kesiapan sektor pertanian.

Pria yang akrab disapa Haji Jalal ini menyoroti pentingnya kesiapan bibit unggul, distribusi pupuk yang tepat sasaran, serta pembenahan irigasi primer dan sekunder agar lahan pertanian di Karawang, Bekasi, dan Purwakarta dapat terus dioptimalkan.

Menurutnya, langkah-langkah ini krusial dalam mencapai ketahanan pangan dan kemandirian pangan nasional.

"Kita harus memastikan petani mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, baik dari segi sarana produksi maupun infrastruktur pertanian. Dengan begitu, produktivitas pertanian bisa meningkat

secara berkelanjutan," ujar Jalal

Selain itu, dalam sarasehan ini turut dibahas penerapan Metode Swadaya Petani Indonesia (SPI) sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Metode SPI menekankan konsep 'bertani sambil mengobati', yakni memperbaiki lahan yang sudah rusak akibat residu pupuk kimia berlebihan.

Metode ini menekankan bahwa kunci sukses pertanian terdiri dari 30% pupuk dan obat-obatan serta 70% media tanah. Untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi:

"Pertama, Restorasi Tanah Tanah yang mengalami kerusakan akibat penggunaan pupuk kimia berlebih perlu diperbaiki agar pH tanah kembali seimbang. Umumnya, petani menggunakan dolomit (kapur

pertanian), tetapi Metode SPI lebih mengandalkan garam krosok dan zeolit nano, yang terbukti lebih efektif dalam memperbaiki tanah dan meningkatkan hasil pertanian," ungkapnya.

Kedua, imbuhnya, pupuk yang seimbang. Penggunaan pupuk harus proporsional antara pupuk makro (NPK) dan pupuk mikro seperti feron, zink, dan Fe. Kombinasi yang seimbang ini mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal.

"Ketiga imunitas tanaman dengan melakukan restorasi tanah dan penggunaan pupuk yang seimbang, daya tahan tanaman terhadap hama dan penyakit akan meningkat, sehingga mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia," urainya.

Metode SPI, imbuhnya, tidak hanya memberikan edukasi tentang cara bertani yang efektif dan efisien tetapi juga siap melakukan pendampingan kepada petani.

"Di berbagai daerah, metode ini telah terbukti mampu meningkatkan produksi pertanian hingga 12 ton per hektar," tutup Haji Jalal.



"Kita harus memastikan petani mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, baik dari segi sarana produksi maupun infrastruktur pertanian. Dengan begitu, produktivitas pertanian bisa meningkat secara berkelanjutan,"

H. JALAL ABDUL NASIR, Ak.

Anggota Komisi XII DPR RI



image istimewa

Hadiri Makassar Cinta Palestina Meity Rahmatia Kecam Kebudayaan Israel pada Rakyat Palestina

Makassar (10/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Meity Rahmatia hadir dan memberikan sambutan dalam acara 'Makassar Cinta Palestina' yang digelar di Ballroom, Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Ahad, (09/02/2025).

Sejumlah peserta aksi begitu antusias dan larut dalam emosi saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Meity Rahmatia berorasi di atas panggung.

Pada acara yang berlangsung, Minggu (9/2/2025) tersebut, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu bicara berapi-api.

Meity meluapkan kemarah-annya pada Israel dan rasa harunya atas penderitaan yang dialami rakyat Palestina.

Meity mengaku, sudah berkali-kali ke Palestina sebelum pecah peristiwa 7 Oktober 2023. Disana, ia menyaksikan langsung penderitaan rakyat Palestina di Gaza. Anak-anak gizi buruk dan orang-orang kurus karena sering kelaparan.

"Saya melihat langsung, bagaimana perut anak-anak buncit dan kurus karena kekurangan gizi," ungkapnya dengan tangis yang tak terbendung.

Meity yang tampil dalam balutan kerudung bendera Palestina di acara itu, mengancam perlakuan yang tak adil terha-

dap Palestina.

"Hari ini, saya berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian sebagai bagian dari wakil rakyat Indonesia untuk menyampaikan sikap tegas dan tidak tergoyahkan."

"Kita menolak segala bentuk intervensi politik yang berusaha membungkam keadilan bagi rakyat Palestina!" tegasnya menyinggung upaya intervensi Amerika Serikat terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC) baru-baru ini.

Diketahui bersama, ICC sebagai institusi peradilan global yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan, memutuskan Benjamin Netanyahu sebagai penjahat perang beberapa waktu lalu. Menurut Meity, keputusan tersebut harus didukung dan dibela.

"Kita tidak boleh diam! Penolakan terhadap proses hukum ini bukan hanya serangan terhadap rakyat Palestina, tapi juga ancaman pada prinsip dasar hukum internasional yang

Hadiri Makassar Cinta Palestina, Meity Rahmatia Kecam Kebradaban Israel pada Rakyat Palestina

« SEBELUMNYA

kita junjung tinggi!" tekannya.

Menurut anggota Komisi Tiga Belas DPR RI tersebut, sanksi Amerika kepada ICC tidak hanya mengorbankan rakyat Palestina, tapi juga ke seluruh dunia yang percaya pada prinsip hukum dan

keadilan internasional.

Meity juga menegaskan, pembunuhan massal, pengusiran paksa, penghancuran rumah-rumah dan fasilitas umum, serta blokade bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina adalah kejahatan perang.

Atas dasar itu, Meity menyerukan 4 poin kepada

dunia dan Indonesia. Pertama, menolak intervensi politik terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC) keadilan tidak boleh dikendalikan oleh negara adidaya atau kepentingan politik tertentu.

"Kedua mendukung langkah-langkah hukum untuk menuntut pemimpin Israel yang terlibat dalam kejahatan perang!

Siapa pun yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan harus diadili tanpa pandang bulu," ujarnya.

Ketiga, imbuhnya, mendesak pemerintah Indonesia untuk memperkuat dukungan bagi Palestina di forum Internasional. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan hak asasi manusia, Indonesia harus berada di garda terdepan dalam perjuangan ini.

"Keempat mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus menyuarakan kebenaran dan mendukung perjuangan rakyat Palestina. Kita bisa berkontribusi dengan berbagai cara: menyebarkan informasi yang benar, memberikan bantuan kemanusiaan, dan terus menekan komunitas Internasional agar bertindak tegas," ujarnya.

"Kita yakin, bahwa kebatilan tidak akan bertahan selamanya! Palestina akan merdeka! Keadilan akan menang!," tutup Meity di acara yang juga diisi dengan hiburan nasyid Shoutul Harokah itu.



image istimewa



"Hari ini, saya berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian sebagai bagian dari wakil rakyat Indonesia untuk menyampaikan sikap tegas dan tidak tergoyahkan. Kita menolak segala bentuk intervensi politik yang berusaha membungkam keadilan bagi rakyat Palestina!"

**Hj. MEITY RAHMATIA,
S.Pd., S.E., M.M.**

Anggota Komisi XIII DPR RI



Adang Daradjatun Soroti Bahaya Narkotika, Pinjaman dan Judi Online dalam Kunjungan ke Dapil

Jakarta (10/02) --- Anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun, melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihannya di Jakarta Utara dan Jakarta Barat pada 8 dan 9 Februari 2025.

Kunjungan ini berlangsung di Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, serta Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Dalam pertemuan dengan masyarakat, beliau menyoroti berbagai isu krusial yang menjadi perhatian utama, terutama terkait bahaya narkoba, pinjaman, dan judi online.

Dalam penyampaian, Adang menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi muda. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya revisi Undang-Undang Narkotika dengan fokus pada rehabilitasi dan kesehatan pengguna, serta penegakan hukum yang tegas dan efektif.

"Kita harus mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi bagi pengguna narkoba dengan rehabilitasi yang memadai, tetapi di sisi lain tetap menegakkan hukum dengan tegas terhadap para bandar dan pengedar narkoba," ujar Adang.

Selain narkoba, bahaya pinjaman dan judi online juga menjadi perhatian serius dalam kunjungan ini. Adang Daradjatun menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya kasus masyarakat yang terjerak

pinjaman online ilegal dan dampak negatif judi online, yang bahkan telah menjangkau anak-anak dan remaja.

"Pinjaman online ilegal dan judi online sudah menjadi permasalahan yang sangat mengkhawatirkan. Banyak keluarga yang hancur karena lilitan utang dan kecanduan judi online. Kita harus bersama-sama mencari solusi agar regulasi yang lebih ketat dapat segera diterapkan," tegasnya.

Sebagai anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun

berkomitmen untuk terus membawa isu-isu ini ke dalam pembahasan di parlemen terutama dalam setiap Rapat Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum bidang Siber di Komisi III guna mencari solusi yang komprehensif bagi masyarakat.

Adang juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam menjaga lingkungan dari bahaya narkoba dan pinjaman serta judi online.

"Dengan kunjungan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan ancaman yang dihadapi dan dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang," tutupnya.

"Pinjaman online ilegal dan judi online sudah menjadi permasalahan yang sangat mengkhawatirkan. Banyak keluarga yang hancur karena lilitan utang dan kecanduan judi online. Kita harus bersama-sama mencari solusi agar regulasi yang lebih ketat dapat segera diterapkan,"

Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

PKS MENDUKUNG PROGRAM CEK KESEHATAN GRATIS, BUKTI KOMITMEN PRABOWO KEPADA RAKYAT



1

PKS TV DPR RI | PKS DPP RI | @fraksipkdpri | @fraksipkdpri | @fraksipkdpri

KADO ULANG TAHUN
Setiap warga negara berulang tahun akan menerima

CEK KESEHATAN GRATIS HINGGA 30 HARI SETELAHNYA

2

PKS TV DPR RI | PKS DPP RI | @fraksipkdpri | @fraksipkdpri | @fraksipkdpri

sumber: KEMENKES | Grafik: Heri

FOKUS SKRINING

1 BAYI BARU LAHIR (<1 TAHUN)

- KESEKIMPIAN HEMOBINTOID
- KEKURANGAN Kalsium
- KEKURANGAN Besi
- KEKURANGAN IYODIN
- KEKURANGAN ZINK
- KEKURANGAN VITAMIN D
- KEKURANGAN VITAMIN B12
- KEKURANGAN VITAMIN B9
- KEKURANGAN VITAMIN C
- KEKURANGAN VITAMIN E
- KEKURANGAN VITAMIN K
- KEKURANGAN VITAMIN L
- KEKURANGAN VITAMIN M
- KEKURANGAN VITAMIN N
- KEKURANGAN VITAMIN O
- KEKURANGAN VITAMIN P
- KEKURANGAN VITAMIN Q
- KEKURANGAN VITAMIN R
- KEKURANGAN VITAMIN S
- KEKURANGAN VITAMIN T
- KEKURANGAN VITAMIN U
- KEKURANGAN VITAMIN V
- KEKURANGAN VITAMIN W
- KEKURANGAN VITAMIN X
- KEKURANGAN VITAMIN Y
- KEKURANGAN VITAMIN Z

2 BALITA DAN ANAK PRASEKOLAH (1-6 TAHUN)

- TALASEMIA
- PERKEMBANGAN PERYAKIT
- TUBERKULOSIS
- CELA DABAH
- TELNICA, ZATA, OGI

3 USIA SEKOLAH DAN REMAJA (7-17 TAHUN)

- PERYAKIT LARUT
- PERYAKIT GINJAL KRONIS
- KANKER
- STROKE

4 DEWASA (18-59 TAHUN)

- PERYAKIT JANTUNG
- PERYAKIT BANTUNG
- PERYAKIT LARUT
- PERYAKIT GINJAL KRONIS
- KANKER
- STROKE
- KEKURANGAN Kalsium
- KEKURANGAN Besi
- KEKURANGAN IYODIN
- KEKURANGAN ZINK
- KEKURANGAN VITAMIN D
- KEKURANGAN VITAMIN B12
- KEKURANGAN VITAMIN B9
- KEKURANGAN VITAMIN C
- KEKURANGAN VITAMIN E
- KEKURANGAN VITAMIN K
- KEKURANGAN VITAMIN L
- KEKURANGAN VITAMIN M
- KEKURANGAN VITAMIN N
- KEKURANGAN VITAMIN O
- KEKURANGAN VITAMIN P
- KEKURANGAN VITAMIN Q
- KEKURANGAN VITAMIN R
- KEKURANGAN VITAMIN S
- KEKURANGAN VITAMIN T
- KEKURANGAN VITAMIN U
- KEKURANGAN VITAMIN V
- KEKURANGAN VITAMIN W
- KEKURANGAN VITAMIN X
- KEKURANGAN VITAMIN Y
- KEKURANGAN VITAMIN Z

5 LANSIA (>60 TAHUN)

- PERYAKIT LARUT
- PERYAKIT GINJAL KRONIS
- KANKER
- STROKE
- KEKURANGAN Kalsium
- KEKURANGAN Besi
- KEKURANGAN IYODIN
- KEKURANGAN ZINK
- KEKURANGAN VITAMIN D
- KEKURANGAN VITAMIN B12
- KEKURANGAN VITAMIN B9
- KEKURANGAN VITAMIN C
- KEKURANGAN VITAMIN E
- KEKURANGAN VITAMIN K
- KEKURANGAN VITAMIN L
- KEKURANGAN VITAMIN M
- KEKURANGAN VITAMIN N
- KEKURANGAN VITAMIN O
- KEKURANGAN VITAMIN P
- KEKURANGAN VITAMIN Q
- KEKURANGAN VITAMIN R
- KEKURANGAN VITAMIN S
- KEKURANGAN VITAMIN T
- KEKURANGAN VITAMIN U
- KEKURANGAN VITAMIN V
- KEKURANGAN VITAMIN W
- KEKURANGAN VITAMIN X
- KEKURANGAN VITAMIN Y
- KEKURANGAN VITAMIN Z

3

PKS TV DPR RI | PKS DPP RI | @fraksipkdpri | @fraksipkdpri | @fraksipkdpri

sumber: KEMENKES | Grafik: Heri

Syarat Ikut Cek Kesehatan Gratis Saat Ulang Tahun

- Memiliki aplikasi Satu Sehat Mobile yang bisa diunduh lewat App Store dan Play Store.
- Memiliki BPJS Kesehatan dengan status peserta aktif.
- Masa berlaku skrining kesehatan gratis berlaku 30 hari setelah tanggal ulang tahun.
- Kehusus bayi, skrining kesehatan gratis dilakukan dalam waktu 24 jam atau dua hari setelah persalinan.
- Membawa KTP, Kartu Keluarga (KK), atau Kartu Identitas Anak (KIA).
- Membawa Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) bagi balita dan anak prasekolah.
- Memiliki tiket pemeriksaan di aplikasi Satu Sehat Mobile atau WhatsApp.
- Mengisi formulir kuesioner skrining mandiri.

4

PKS TV DPR RI | PKS DPP RI | @fraksipkdpri | @fraksipkdpri | @fraksipkdpri

sumber: kemenkes | Grafik: Heri

CARA DAFTAR

- Unduh Aplikasi SATUSEHAT Mobile yang tersedia di Google Play Store atau App Store
- Buka Aplikasi. Buat Akun atau Login jika sudah memiliki akun.
- Lengkapi Data Diri dan Pilih Jadwal untuk pemeriksaan kesehatan. Pengisian data ini akan digunakan sebagai dasar dalam penjadwalan pemeriksaan.
- Pengguna akan menerima tiket pemeriksaan melalui aplikasi dan WhatsApp, dan mendapatkan pengingat jadwal pemeriksaan yang dikirim pada H-30, H-7, dan H-1 sebelum ulang tahun. Pada H-7, pengguna akan menerima kuesioner skrining yang harus diisi secara mandiri.
- Datang ke Puskesmas sesuai jadwal yang tertera pada tiket pemeriksaan dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak, atau Buku Kesehatan Ibu dan Anak.

5

PKS TV DPR RI | PKS DPP RI | @fraksipkdpri | @fraksipkdpri | @fraksipkdpri

sumber: kemenkes | Grafik: Heri

Medical Check-Up Gratis, Investasi Sehat untuk Masa Depan!

Pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang berulang tahun adalah upaya untuk melakukan tindakan preventif dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan momentum ulang tahun, masyarakat akan lebih mengingat pentingnya melakukan medical check-up secara berkala.

Dr. Kurniasih Mufidayati, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI



6

PKS TV DPR RI | PKS DPP RI | @fraksipkdpri | @fraksipkdpri | @fraksipkdpri

sumber: Berita Fraksi PKS DPR RI | Grafik: Heri



image istimewa

Pengelolaan Tambang oleh Kampus Bisa Atasi Biaya Kuliah

Jakarta (04/02) — Revisi ketiga Undang-Undang Mineral dan Batubara dinilai membuka tabir eksklusivitas pengelolaan tambang. Sebab, kampus juga mendapat peluang untuk ikut mengelola tambang.

"Harapannya adalah kalau kampus yang mengelola, ada tata kelola pertambangan yang berkualitas," kata anggota Komisi XII DPR RI Muhammad Haris di Ruang PPIID Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).

"Ada kesempatan bagi masyarakat karena kampus memiliki dana yang besar. Kalau sumber-sumber pendanaan ini diperbanyak, akan semakin banyak pula mobilitas vertikal yang terjadi pada anak bangsa

Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si.

Anggota Komisi XII DPR RI

Hal itu disampaikan dalam diskusi Forum Legislasi bertema Keberlanjutan Sumber Daya Alam: Peran Perguruan Tinggi Menjamin Praktik Pertambangan yang Ramah Lingkungan. Menurutnya, tambang harus betul-betul dimanfaatkan sebagaimana semangat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2.

"Selama puluhan tahun - mungkin juga sejak kita merdeka - tambang adalah barang mewah dan eksklusif betul pengelolannya. Kampus dapat mengimplementasikan idealisme mereka dalam konteks pengelolaan pertambangan," ujarnya.

Hal itu juga memberi kesempatan bagi kampus untuk mendapatkan peluang keuangan yang lebih baik. Sehingga kesulitan untuk menjangkau pendidikan tinggi karena faktor UKT, bisa diatasi.

"Ada kesempatan bagi masyarakat karena kampus memiliki dana yang besar. Kalau sumber-sumber pendanaan ini diperbanyak, akan semakin banyak pula mobilitas vertikal yang terjadi pada anak bangsa," tandasnya.

Dengan demikian, keluhan masyarakat bahwa kuliah identik dengan biaya tinggi, bisa teratasi. Yakni dengan izin usaha pertambangan diberikan kepada kampus.

"Aspek akademis bisa terpenuhi dan aspek ekonomis juga terpenuhi. Namun, pemberian izin usaha pertambangan kepada kampus harus betul-betul dipersiapkan oleh perguruan tinggi sebaik-baiknya," tegas Haris.

Artinya, ekspektasi yang positif ini jangan sampai berbalik.



image istimewa

Rahmat Saleh Fasilitasi Mediasi Kampus Swasta Sumbang dengan Komisi X DPR RI Terkait Beasiswa KIP

Jakarta (04/02) --- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menerima kunjungan mediasi dari perwakilan Universitas Islam Sumatera Barat (UISB) dan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Ar Risalah di Gedung Senayan, Jakarta, Senin (03/02/2025).

Pertemuan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi mediasi dengan Komisi X DPR RI terkait akses beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi mahasiswa kurang mampu yang berprestasi.

Dalam audiensi tersebut, Rahmat menegaskan pentingnya memastikan mahasiswa dari perguruan tinggi swasta juga mendapatkan akses yang adil terhadap beasiswa KIP.

Menurutnya, pendidikan merupakan hak semua anak bangsa, sehingga mekanisme penyaluran beasiswa harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.

"Kami menyadari bahwa banyak mahasiswa di kampus swasta, khususnya di Sumatera Barat, berasal dari keluarga kurang mampu tetapi memiliki prestasi akademik yang sangat baik. Oleh karena itu, kami akan berusaha agar aspirasi mereka dapat diperjuangkan di tingkat kebijakan," kata Rahmat.

Rahmat menjelaskan, pertemuan ini menjadi langkah

awal dalam mendorong pemerintah untuk meninjau kembali kuota dan kriteria penerima beasiswa KIP.

"Kami hari ini memfasilitasi berkoordinasi dengan Komisi X agar lebih banyak mahasiswa dari perguruan tinggi swasta mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh bantuan pendidikan," tambahnya.

Perwakilan UISB dan STEI Ar Risalah menyampaikan kendala utama yang mereka hadapi dalam mengakses beasiswa KIP.

Salah satu perwakilan dari UISB mengungkapkan bahwa meskipun mahasiswanya banyak yang memenuhi syarat sebagai penerima KIP, kuota yang terbatas menjadi penghambat utama.

"Kami berharap ada peningkatan kuota untuk kampus swasta. Mahasiswa kami banyak yang memenuhi kriteria, tetapi sering kali terkendala oleh alokasi kuota

Rahmat Saleh Fasilitas Mediasi Kampus Swasta Sumbar dengan Komisi X DPR RI Terkait Beasiswa KIP

« SEBELUMNYA

yang lebih banyak diberikan kepada perguruan tinggi negeri,” ujar perwakilan UISB.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, dr. Gamal turut hadir dalam pertemuan itu, menyampaikan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran beasiswa KIP.

Gamal menegaskan pentingnya memastikan bahwa beasiswa ini benar-benar diterima oleh mahasiswa yang membutuhkan.

“Kami akan meninjau kembali kebijakan terkait beasiswa KIP, termasuk bagaimana alokasi kuota ditentukan. Jangan sampai mahasiswa yang memenuhi kriteria justru terhambat hanya

karena kuota yang terbatas,” ujar dr. Gamal.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan akses beasiswa KIP bagi mahasiswa di perguruan tinggi swasta dapat lebih diperhatikan. Rahmat Saleh dan dr. Gamal berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga ada solusi yang lebih baik bagi mahasiswa kurang mampu yang berprestasi.

“Kami tidak ingin ada mahasiswa yang terhalang dalam meraih pendidikan tinggi hanya karena masalah ekonomi. Pendidikan adalah investasi bagi masa depan bangsa, dan kami akan terus memperjuangkan hal ini,” pungkas Rahmat Saleh.



“Kami menyadari bahwa banyak mahasiswa di kampus swasta, khususnya di Sumatera Barat, berasal dari keluarga kurang mampu tetapi memiliki prestasi akademik yang sangat baik. Oleh karena itu, kami akan berusaha agar aspirasi mereka dapat diperjuangkan di tingkat kebijakan,”

H. RAHMAT SALEH, S.Farm., M.I.P

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I



image istimewa

Sohibul Iman Dukung Kemajuan UMKM dan Potensi Usaha di Dapil Tasikmalaya

Tasikmalaya (06/02) -- Anggota DPR-RI Fraksi PKS, Muhammad Sohibul Iman menyambut dengan hangat kehadiran rombongan DPD PKS Dapil 3 Kota Tasikmalaya di ruang rapat komisi XI pada 5 Februari 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Sohibul Iman memberikan beberapa pandangannya terkait apa-apa saja yang sudah disampaikan oleh konstituen. Sohibul Iman mengapresiasi kinerja para konstituen dalam setiap pagelaran kontestasi politik pada level mana pun.

Dan sehubungan dengan hal tersebut, ia juga menyampaikan bahwa saat ini, di masa-masa tidak adanya kontestasi politik, maka dalam rentang waktu tersebut perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam membina masyarakat.

"Kita ada momentum, 3 tahun ke depan tidak dihadapkan pada gonjang-ganjing politik (pemilihan kepala negara & daerah). Mudah-mudahan waktu 3 tahun tersebut bisa dimanfaatkan dalam membina masyarakat, agar mereka (masyarakat) bisa semakin merasakan kehadiran kita. Tentu harus ada upaya-upaya yang terencana dan terukur".

Untuk itu, Sohibul Iman juga menyebutkan bahwa dalam mendukung upaya tersebut, ada ikhtiar untuk mewujudkan reses dengan

mengkolaborasi pusat, provinsi, serta kota/kabupaten agar bisa lebih baik lagi. Sebab menurut Sohibul Iman, masa reses merupakan salah satu kesempatan bagi anggota dewan dan juga partai untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.

"Reses ini kan kesempatan yang baik bertemu masyarakat, terutama dalam menyerap aspirasi dari mereka. Sehingga di masyarakat tidak timbul prangka yang kurang baik. Bahwa kita datang menghampiri mereka tidak hanya pada saat menjelang pemilu saja".

Sohibul Iman kemudian melanjutkan, bahwa mayoritas bantuan yang bisa ia bawa ke dapilnya saat ini berupa sosialisasi-sosialisasi serta bantuan-bantuan yang berkaitan dengan hukum dan ham, seperti dalam hal perlindungan saksi dan korban dalam satu permasalahan.

Kendati begitu, Sohibul Iman menyebut adanya kerja sama antar anggota di fraksi PKS terkait bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

Sohibul Iman Dukung Kemajuan UMKM dan Potensi Usaha di Dapil Tasikmalaya

« SEBELUMNYA

"Tetapi InsyaAllah kita di fraksi PKS, itu kita saling memberi. Misal di komisi X yang salah satunya adalah bidang pendidikan, dari fraksi diambil sebagian ke anggota dewan di komisi lain, termasuk saya yang beberapa kali ke dapil memberikan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)," terang pria yang akrab disapa MSI ini.

Sohibul Iman juga mengutarakan rasa bahagiannya ketika mendengar para perwakilan DPC ini memiliki

orientasi pada pemberdayaan ekonomi, yang menurutnya ini adalah hal yang sangat baik. Yang pada pertemuan ini, dibuktikan oleh beberapa konstituen yang memperkenalkan produk dari usaha yang mereka jalani.

Sohibul Iman juga menambahkan bahwa usaha yang sudah berjalan ini, bersama-sama diikhtiarkan agar bisa lebih berkembang ke tingkat yang lebih tinggi lagi.

"Saya senang ketika di sini disebut bahwa kita (struktur) berorientasi pada

pemberdayaan ekonomi. Karena memang paling mudah itu ngumpul orang, lalu kita kasih ongkos pulang. Lalu sudah tidak ada yang tersisa. Yang bagus itu ya kita kumpul (masyarakat), tapi yang berkelanjutan. Setelah kumpul itu, kita masih bisa membina mereka untuk ke depannya. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. UMKM yang sudah ada, kita ikhtiarkan agar bagaimana mereka bisa lebih maju, tentunya ke nasional, dan juga go internasional".

Sebagai penutup, Sohibul Iman menyatakan saat kunjungan ke dapil, ia akan melihat apa saja potensi-potensi usaha dan juga tidak menutup kemungkinan sektor wisata yang ada di Tasikmalaya.



"Kita ada momentum, 3 tahun ke depan tidak dihadapkan pada gonjang-ganjing politik (pemilihan kepala negara & daerah). Mudah-mudahan waktu 3 tahun tersebut bisa dimanfaatkan dalam membina masyarakat, agar mereka (masyarakat) bisa semakin merasakan kehadiran kita. Tentu harus ada upaya-upaya yang terencana dan terukur".

**MOHAMAD SOHIBUL
IMAN, M.Eng., Ph.D.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI



image istimewa

Raker Fraksi PKS, Nevi Zuairina Bertekad Perkuat Advokasi untuk Masyarakat

Kabupaten Bogor (10/02) --- Dalam upaya memperkuat advokasi kepada masyarakat, Fraksi PKS DPR RI menggelar rapat kerja yang dihadiri oleh seluruh anggota fraksi.

Rapat ini menjadi momentum penting untuk mempertegas komitmen perjuangan Fraksi PKS dalam mengawal kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara efektif di parlemen.

Nevi Zuairina, anggota DPR RI Komisi XII yang turut hadir dalam rapat tersebut, menegaskan bahwa Fraksi PKS akan terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat di berbagai sektor.

Menurutnya, tantangan ke depan semakin kompleks, sehingga anggota legislatif harus memiliki strategi yang lebih kuat dalam memperjuangkan kead-

ilan sosial, kesejahteraan ekonomi, serta perlindungan bagi kelompok rentan di masyarakat. "Kami akan hadir membela kepentingan rakyat," ujar politisi PKS ini.

Legislator Sumatera Barat ini menekankan bahwa advokasi kepada masyarakat tidak hanya sebatas menyuarakan kepentingan rakyat dalam sidang-sidang parlemen, tetapi juga melalui kerja-karya nyata di lapangan.

Fraksi PKS harus menjadi jembatan yang efektif antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat, memastikan bahwa setiap regulasi yang disusun benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

Ia menambahkan bahwa

banyak persoalan yang harus segera diselesaikan, terutama dalam bidang kesejahteraan sosial, ekonomi kerakyatan, serta akses pendidikan dan kesehatan yang merata.

Dalam forum ini, Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara peran sebagai mitra pemerintah dan fungsi kritis dalam mengawasi kebijakan yang diambil.

Nevi menegaskan bahwa Fraksi PKS akan selalu mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, tetapi juga tidak akan ragu untuk mengkritik jika ada kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.

"Bagi PKS, kehadiran di parlemen adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab," ungkap Nevi.

Lebih lanjut, aktivis perempuan PKS ini menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dengan konstituen.

Menurutnya, Anggota legislatif harus aktif turun ke lapangan, berdialog dengan masyarakat, serta mendengar langsung permasalahan yang mereka hadapi. Hasil dari komunikasi ini kemudian harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret dan memberikan solusi nyata.

Rapat kerja ini menjadi bukti nyata bahwa Fraksi PKS tidak hanya bekerja di dalam ruang sidang, tetapi juga memiliki misi besar untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat



Fraksi PKS harus menjadi jembatan yang efektif antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat, memastikan bahwa setiap regulasi yang disusun benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

secara nyata.

"Saya berharap bahwa melalui forum ini, Fraksi PKS semakin solid dan siap menghadapi tantangan ke depan dengan semangat juang yang lebih

kuat. Bagi kami, politik adalah ladang pengabdian, dan Fraksi PKS akan terus berjuang agar setiap kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada masyarakat," tutup Nevi Zuairina.

PROGRAM UNGGULAN

FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kecatif Atrokrakj Substantif

Parlementaria (Diskusi Publik,
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,
Ruang Aleg dan Internshipsks)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.



image istimewa

Tolak Manuver Trump Kuasai Gaza, HNW Serukan Indonesia Bersamai Komunitas Internasional Bela Palestina

Jakarta (06/02) — Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Hidayat Nur Wahid, mendukung komunitas Internasional yang menolak keras pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump

yang ingin mengontrol (menguasai) wilayah Gaza, dan merelokasi semua warganya ke luar Palestina.

Pria yang akrab disapa HNW ini menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah yang lebih efektif dengan bersatu bersama

Pria yang akrab disapa HNW ini menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah yang lebih efektif dengan bersatu bersama seluruh komunitas dunia internasional untuk menggagalkan rencana Trump yang berlawanan dengan hukum internasional, manuver yang juga sangat membantu Israel memperluas penjajahannya atas Palestina.

seluruh komunitas dunia internasional untuk menggagalkan rencana Trump yang berlawanan dengan hukum internasional, manuver yang juga sangat membantu Israel memperluas penjajahannya atas Palestina.

"Trump yang didampingi Netanyahu (PM Israel yang oleh ICC telah diperintahkan untuk didampangi telah mengumumkan proyeknya untuk kuasai Gaza, dan mengusir semua warga Gaza keluar dari Palestina. Dan dunia internasional sudah menyatakan kritik terbuka dan penolakan keras. Maka agar berhasil, mereka perlu berkolaborasi agar dapat lebih efektif menggagalkan manuver Trump yang didukung Israel itu. Usulan Trump itu selain dinilai sebagai pengalihan isu kejahatan

kemanusiaan Israel terhadap Gaza dan sekarang juga terhadap Jenin (Tepi Barat) di saat gencatan senjata diberlakukan, itu juga bentuk nyata ethnic cleansing, dan menjadi model 'penjajahan' baru yang akan menimbulkan ketidakdamaihan dan malah memperluas medan konflik di kawasan Timur Tengah, yang bisa berimbas ke dunia secara luas," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis(06/02).

HNW mengatakan bahwa dunia internasional, termasuk Mesir dan Yordania - dua negara yang dibidiki Trump untuk lokasi warga Gaza setelah diusir dari Palestina - tegas menolak. Presiden otoritas Palestina Mahmud Abbas yang

Tolak Manuver Trump Kuasai Gaza, HNW Serukan Indonesia Bersamai Komunitas Internasional Bela Palestina

« SEBELUMNYA

sering memusuhi pejuang Gaza juga menolak usulan Trump itu. Bahkan, Arab Saudi yang sering difitnah Trump, juga keras menolak ide relokasi warga Gaza keluar Palestina dan menegaskan dukungannya terhadap Palestina Merdeka.

Semua negara anggota Liga Arab maupun Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga tegas menolak. Uni Eropa juga menolak dengan menyampaikan bahwa Gaza merupakan

bagian dari Palestina merdeka sebagai solusi dua negara. Penolakan juga datang dari negara anggota EU (seperti Jerman, Belgia, Spanyol dan Irlandia) dan negara Eropa non anggota EU seperti Norwegia. Di belahan dunia lain, seperti di Amerika Selatan sejumlah negara seperti Brasil, Kolombia dan Kuba juga bersikap sama; menolak konspirasi Trump. Dan yang tak kalah penting adalah semua anggota tetap Dewan Keamanan PBB di luar Amerika Serikat, seperti Inggris, Peran-

HNW mengatakan bahwa dunia internasional, termasuk Mesir dan Yordania - dua negara yang dibidik Trump untuk lokasi warga Gaza setelah diusir dari Palestina - tegas menolak. Presiden otoritas Palestina Mahmud Abbas yang sering memusuhi pejuang Gaza juga menolak usulan Trump itu. Bahkan, Arab Saudi yang sering difitnah Trump, juga keras menolak ide relokasi warga Gaza keluar Palestina dan menegaskan dukungannya terhadap Palestina Merdeka.

cis, Rusia dan China juga secara terbuka menyatakan penolakan.

Sekjend PBB, Guterres juga menolak dan menegaskan bahwa semua jenis pengusiran warga ke lain negara adalah bentuk ethnic cleansing yang tidak bisa diterima. Maka wajar kalau Pelapor Khusus PBB untuk wilayah penduduk Palestina Francesca Albanese menyebut rencana Trump itu bukan hanya melanggar hukum internasional, tidak bermoral, sangat tidak bertanggung jawab, ethnic cleansing, dan juga termasuk kejahatan internasional.

"Itu adalah rencana yang sangat tidak masuk nalar pikiran orang yang akalnya sehat, dan tidak layak disampaikan oleh pemimpin suatu negara besar seperti Amerika Serikat. Rencana Trump itu termasuk ke dalam kategori pembersihan etnis (ethnic cleansing), kejahatan internasional, dan penjahatan model baru yang tidak bisa diterima oleh masyarakat yang beradab," tukasnya.

Maka, HNW mengapresiasi sikap tegas Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu) yang telah mengeluarkan pernyataan terbuka menolak rencana Trump itu, dan memastikan tetap berlakunya hak untuk menentukan nasib sendiri (right to self determination) warga Palestina terhadap wilayahnya. Ia juga sepakat dengan sikap Kemlu yang



menilai bahwa akar penyebab konflik adalah pendudukan Israel yang ilegal dan berkepanjangan di wilayah Palestina.

"Penjajahan Israel atas Palestina itulah yang seharusnya diselesaikan oleh Trump kalau dia menghendaki adanya perdamaian, sebagaimana dia nyatakan saat kampanye. Bukan justru ingin menguasai Gaza, dan mengusir warganya keluar dari tanahnya sendiri. Karena manuver itu jelas

membantu Israel meluaskan pendudukannya, padahal pendudukan Israel atas Palestina adalah illegal sebagaimana advisory opinion dari Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yang diakomodasi PBB menjadi Resolusi Majelis Umum PBB," ujarnya.

Dengan demikian, HNW berharap agar sikap Kemlu dapat berhasil diwujudkan,

Tolak Manuver Trump Kuasai Gaza, HNW Serukan Indonesia Bersamai Komunitas Internasional Bela Palestina

« SEBELUMNYA

maka penting bagi Indonesia memaksimalkan momentum ini dengan lebih efektif menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan negara2 yang sudah menyatakan menolak ambisi Trump untuk kuasai Gaza dan mengusir warganya. Kolaborasi bisa dilakukan baik dengan negara2 yang tergabung di OKI, Liga Arab maupun PBB (terma-

suk empat negara Anggota Tetap DK PBB itu). Maka penting bagi Indonesia untuk mengusulkan segera diselenggarakannya sidang darurat, selain untuk bersama-sama menggagalkan rencana itu, juga untuk mengawal semua ketentuan pelaksanaan gencatan senjata, dan menghukum Israel karena terbukti tidak melaksanakan secara benar semua butir dan tahapan gencatan senjata



dengan Hamas.

HNW juga menyatakan bahwa sikap Trump yang terus berpihak pada Israel negara yang telah melanggar berbagai resolusi PBB ini, bisa menjadi momentum untuk mereformasi sistem yang berlaku di PBB agar bisa lebih adil dan beradab. Salah satunya adalah terkait sistem veto yang ada di Dewan Keamanan PBB yang kerap digunakan AS untuk melindungi Israel.

"Trump juga telah menyatakan akan keluar dari WHO dan Dewan HAM PBB, atau Trump seharusnya tidak perlu tanggung-tanggung, sekalian saja keluar dari Dewan Keamanan PBB, atau bersama Israel keluar dari keanggotaan di PBB," ujarnya.

"Kecuali kalau Trump segera menarik/tidak melanjutkan usulannya karena berhadapan dengan penolakan meluas dari publik (termasuk di AS) dan dunia internasional, apalagi warga AS termasuk yang beragama Yahudi banyak yang demo menolak sikap Trump tersebut, bahkan sejumlah anggota Kongres AS sudah mengancam untuk memakzulkan Trump atas usulannya untuk menguasai Gaza dan mengusir semua warga Gaza keluar dari Palestina," tutupnya.



"Itu adalah rencana yang sangat tidak masuk nalar pikiran orang yang akal nya sehat, dan tidak layak disampaikan oleh pemimpin suatu negara besar seperti Amerika Serikat. Rencana Trump itu termasuk ke dalam kategori pembe-
risihan etnis (ethnic cleansing), kejahatan internasional, dan penjahatan model baru yang tidak bisa diterima oleh masyarakat yang beradab,

**Dr. H.M. HIDAYAT
NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI



image istimewa

Peringatan Isra Mi'raj, Habib Aboe: Perkuat Tekad Kita Dukung Kemerdekaan Palestina

Jakarta (10/02) --- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Peringatan Isra Mi'raj 1446 H dengan mengadakan seminar sehari bertema 'Peran Indonesia dalam Kemerdekaan Palestina' pada Ahad, (9/2/2025) di Hotel Aston, Jakarta.

Seminar yang menghadirkan diplomat senior Duta Besar RI untuk PBB periode 2004-2007 Prof. Dr. Makarim Wibisono dan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI Dr. Abdul Kadir Jailani ini dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

"Semoga upaya kita melakukan berbagai langkah strategis dan kerja sama internasional dapat membawa keadilan dan kemerdekaan bagi tanah suci yang penuh berkah ini,"

**HABIB ABOE
BAKAR ALHABSYI**

Anggota Komisi III DPR RI

Momentum Isra Mi'raj, sebut Habib Aboe, mengingatkan kita bahwa tempat suci yang didatangi Nabi Muhammad saw yaitu Baitul Maqdis yang terletak di Palestina masih belum merdeka. Hal ini harus menjadi momen penguatan tekad kita untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

"Marilah kita jadikan momen peringatan Isra Mi'raj ini sebagai titik tolak untuk memperkuat tekad kita dalam mendukung kemerdekaan Palestina," ujar Habib Aboe.

Sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Beberapa langkah yang dapat diambil di antaranya adalah melakukan diplomasi internasional

untuk menggagal dukungan kepada Palestina, memberikan tekanan politik dan ekonomi, melakukan gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS), serta memberikan bantuan kemanusiaan.

"Semoga upaya kita melakukan berbagai langkah strategis dan kerja sama internasional dapat membawa keadilan dan kemerdekaan bagi tanah suci yang penuh berkah ini," tutup Habib Aboe.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah DPP PKS ini turut dihadiri oleh puluhan perwakilan dari berbagai organisasi Islam dan masyarakatan.



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[@fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)



Twitter
[@FPKSDPRRI](https://twitter.com/FPKSDPRRI)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI



Tiktok
[@fraksipksdprri](https://www.tiktok.com/@fraksipksdprri)

***Nantikan
Setiap Pekan***